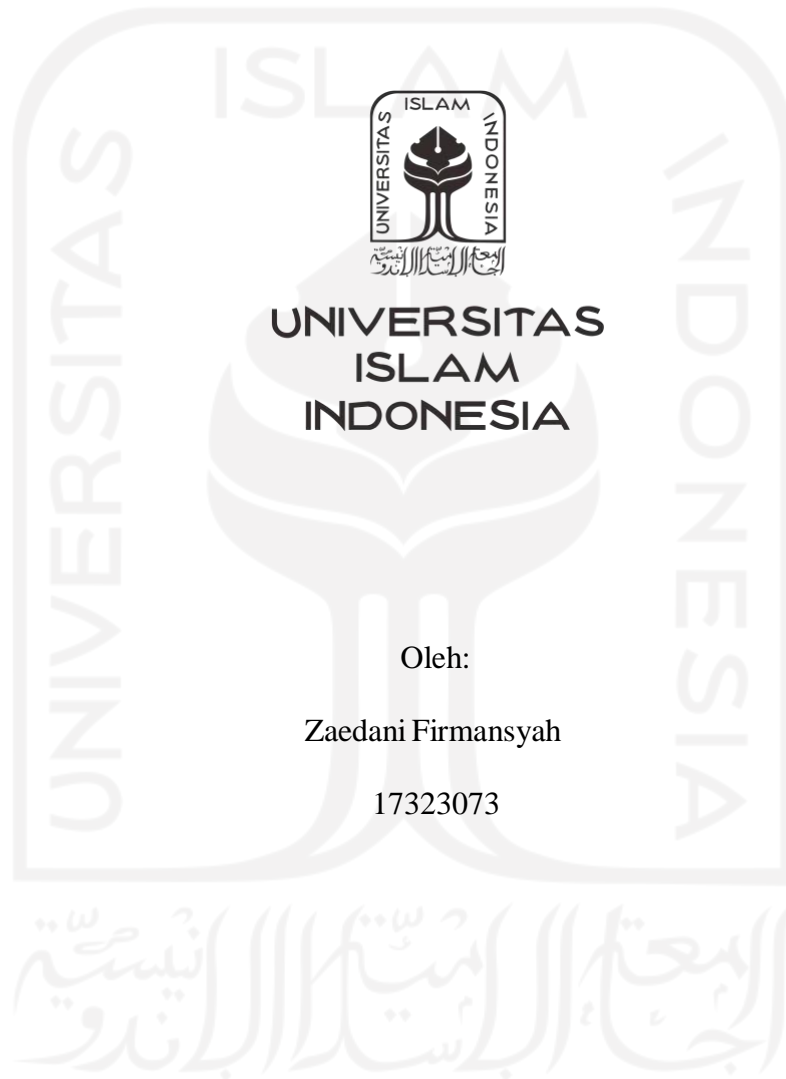


**PARADIPLOMASI ANTARA NUSA TENGGARA BARAT DENGAN
KUJAWSKO-POMORSKIE POLANDIA 2019-2021**

SKRIPSI



Oleh:

Zaedani Firmansyah

17323073

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**PARADIPLOMASI ANTARA NUSA TENGGARA BARAT DENGAN
KUJAWSKO-POMORSKIE POLANDIA 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Zaedani Firmansyah

17323073

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PARADIPLOMASI ANTARA NUSA TENGGARA BARAT DENGAN
KUJAWSKO-POMORSKIE POLANDIA 2019-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

18 Januari 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

07 Desember 2021

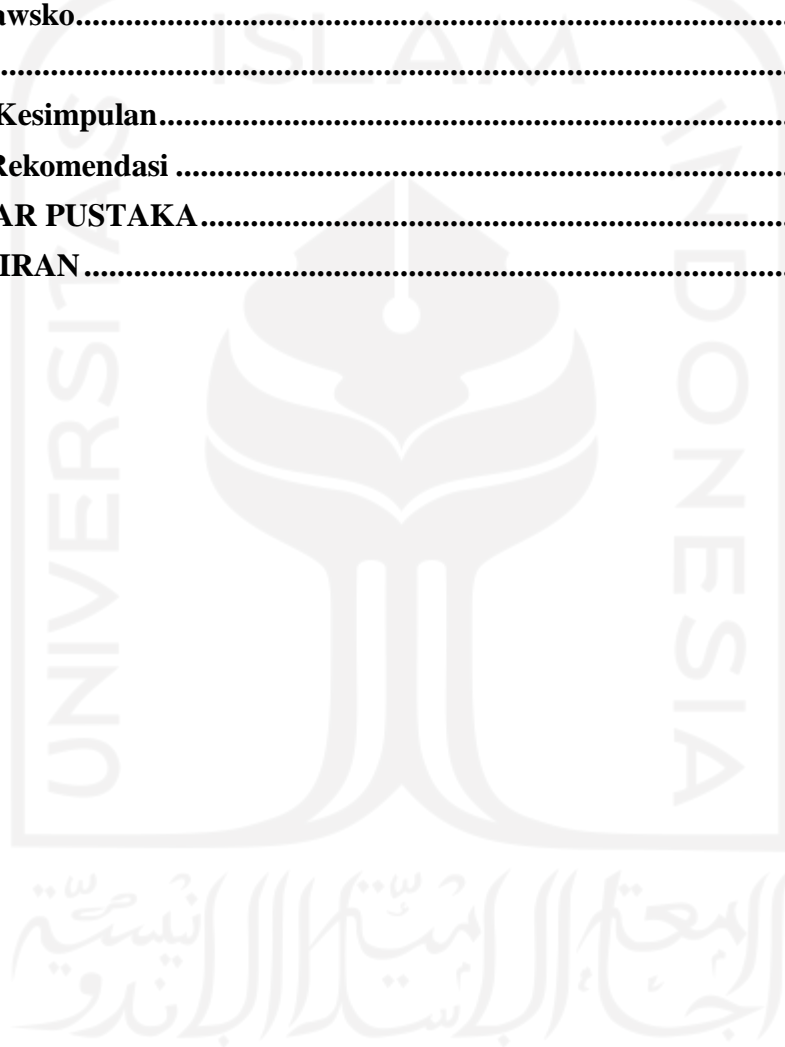


Zaedani Firmansyah

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	11
1.8 Metode Penelitian	12
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	12
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2	17
2.1. Profil Provinsi NTB	17
2.2. Profil Kujawsko Pomorskie	21
2.3. Potensi Kerja Sama Antara NTB dengan Kujawsko	26
2.3.1 <i>Potensi NTB</i>	26
2.3.2 <i>Potensi Kujawsko</i>	27
2.3.3 <i>Kesamaan Antara NTB dengan Kujawsko Pomorskie</i>	28

2.4. Kepentingan NTB Dalam Kerja Sama Paradiplomasi dengan Kujawsko Pomorskie	29
BAB 3	34
3.1. Adanya Biro Kerja sama sebagai Langkah Awal Paradiplomasi NTB	34
3.2. Kunjungan Resmi Antar Pemerintah Daerah NTB dengan Kujawsko	38
3.3. Partisipasi NTB dalam Forum Internasional.....	44
3.4. Pembentukan Kelompok Kerja Regional dalam Kerja sama dengan Kujawsko.....	48
BAB 4	55
4.1. Kesimpulan.....	55
4.2 Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Daerah Wilayah NTB Menurut Daratan Tahun 2018	16
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Wilayah NTB Tahun 2013-2017	17
Tabel 3.1 Action Plan Pemerintah NTB	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rencana tata Ruang Wilayah Prov. NTB Tahun 2009-2029	21
Gambar 3. 1 Kunjungan Kerja Pemerintah Wilayah NTB ke Kedubes Polandia	40
Gambar 3. 2 Sambutan Mahasiswa Baru oleh Nicolaus Copernicus University	40



DAFTAR SINGKATAN

ADPIM	: Administrasi Pimpinan
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IKM	: Industri Kecil Menengah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPMNTB	: Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat
KEK	: Kawasan Ekonomi Kreatif
Kesda	: Kerja sama Daerah
KSP	: Kawasan Strategis Wilayah
KUKM	: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
LoI	: letter of Intent
LPP	: Lembaga Pengembangan Pendidikan
MoU	: Memorandum of Understanding
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NTB	: Nusa Tenggara Barat
PDB	: Produk Domestik Bruto
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
Setda	: Sekretariat Daerah
SMA	: Sekolah Menengah Atas
UE	: Uni Eropa
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Penelitian ini berbicara tentang bagaimana paradiplomasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Kujawsko Pomorskie Polandia. Paradiplomasi secara umum dapat diterjemahkan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh entitas sub-nasional atau sub-state dalam melakukan kegiatan diplomasi dengan mitra luar negerinya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan lima (5) prinsip utama tentang paradiplomasi oleh Kuznetsov. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hubungan paradiplomasi pemerintah Provinsi NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia jika merujuk pada prinsip yang dituangkan oleh Kuznetsov (2015) yaitu, hanya mampu memenuhi *empat* dari *enam* prinsip utama tentang paradiplomasi oleh Kuznetsov (2015). Dua prinsip yang tidak dapat terpenuhi ialah, tidak adanya kantor subnasional yang secara permanen berada di Polandia dan tidak adanya partisipasi oleh otoritas wilayah dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh entitas asing dalam kegiatan delegasi resmi pemerintah pusat mereka.

Kata Kunci: Paradiplomasi Nusa Tenggara Barat, Prinsip Paradiplomasi, Kujawsko Pomorskie Polandia.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kini NTB mulai menunjukkan wajahnya ke dunia internasional, terutama sejak dibangunnya Sirkuit Mandalika sebagai arena Moto GP di Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK). Pembangunan Sirkuit Mandalika bukan satu-satunya fokus pemerintah NTB dalam membangun hubungan kerja internasional, terdapat banyak aspek yang menjadi fokus pemerintah dalam membangun hubungan kerja internasional, salah satu antaranya ialah dalam aspek pendidikan dan pariwisata. Pendekatan yang dilakukan pemerintah NTB adalah dengan membentuk paradiplomasi dengan *sub-state* yang ada di belahan negara lain.

Paradiplomasi secara keseluruhan dapat diartikan sebagai gerakan yang dilakukan oleh elemen sub-publik atau sub-negara dalam mengarahkan latihan politik dengan kaki tangan mereka yang tidak dikenal. Hal ini tergantung pada cara negara terlalu besar untuk mempertimbangkan untuk mengurus masalah atau menangani hal-hal kecil dan secara bersamaan negara terlalu kecil untuk berpikir tentang mengelola hal-hal besar. Dengan demikian, negara saat ini bukan satu-satunya penghibur melainkan menjadi penghibur sub-publik yang mulai mendominasi dan mengambil bagian dalam latihan hubungan global untuk melayani setiap elemen terkait. (Alam, G.N., & Sudirman, A., 2020, p.32). Istilah paradiplomasi pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah

'parallel diplomacy' menjadi 'paradiplomacy', yang mengacu pada makna 'the foreign policy of non-central governance' (Mukti, T.A., 2015, p. 85-86).

Saat ini terdapat banyak program unggulan yang menjadi perhatian pemerintah NTB dalam meningkatkan produktivitas wilayah dan juga pembangunan sumber daya manusianya. Program tersebut mencakup bidang sumber daya manusia seperti beasiswa NTB, bidang sumber daya alam seperti desa wisata, zero waste, industrialisasi. Kemudian dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam, NTB membentuk kerjasama paradiplomasi dengan Kujawsko-Pomorskie, Polandia dengan tajuk sister governance (Parastasia. C. 2021). Menurut laporan dari Biro Kerjasama NTB terdapat dua paradiplomasi antara NTB dengan kota/provisi luar negeri yaitu Pernyataan Kehendak Pemprov NTB dengan Kedutaan Besar Denmark dan Pernyataan Kehendak Pemprov NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia (Biro Kerjasama Pemprov NTB, 2019). Kerjasama NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia lebih menarik untuk ditinjau karena berfokus pada kerjasama ekonomi, pendidikan dan budaya, sedangkan kerjasama NTB dengan Kedutaan Besar Denmark lebih kepada sektor energi dan sektor lingkungan hidup.

Partisipasi di bidang ekonomi, persekolahan, dan budaya tentu akan lebih bermanfaat karena menyentuh semua lapisan masyarakat karena Indeks Pembangunan Manusia NTB tahun 2020 masih belum basi di angka 29. Memasuki tahun 2020 mendatang. Buku Indeks Pembangunan Manusia Badan Pusat Statistik, pembangunan IPM Indonesia pada tahun 2020 mengalami jeda yang sangat besar dengan hanya berkembang sebesar 0,03 persen, jauh lebih lambat dari

perkembangan tahun sebelumnya sebesar 0,74 persen. Keheningan ini disebabkan oleh pengurangan komponen gaya hidup yang baik yang ditangani oleh variabel penggunaan per kapita yang benar-benar berubah, sedangkan elemen rentang hidup dan kehidupan yang solid dan informasi ditangani oleh faktor Harapan Hidup saat memasuki dunia (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masih berkembang meskipun fakta bahwa pembangunan kembali mereda (IPMNTB Tahun 2020).

Pada tahun 2019, perwakilan utama Dr. H. Zulkieflimansyah bertemu dengan delegasi dari Polandia untuk menyelidiki berbagai kebebasan untuk berkolaborasi. Dalam LoI (*Letter of Intent*) antara pemerintah NTB dan Polandia terbuka untuk partisipasi di bidang sekolah, industri perjalanan, dan urusan keuangan bisnis (ppid.ntbprov.go.id). Di bidang pelatihan, pemerintah daerah bermaksud mengirim siswa ke Kota Torun, sebagai tim dengan 3HK (EU-Asean Institute of Sustainable Development) dalam memajukan masyarakat melalui instruksi diplomat. Pemerintah Torun juga mengharapkan untuk memulai asosiasi industri perjalanan dengan mengirimkan penulis dari Polandia untuk melihat keunggulan NTB dan membantu memajukannya di Polandia.

Melihat bentuk kerjasama yang disepakati pemerintah wilayah NTB di atas yaitu melakukan sesuatu kerjasama dan membuka kesempatan bagi NTB untuk dapat memperbaiki setiap persoalan yang terkait dengan pendidikan, pariwisata, dan bisnis. Meskipun kerjasama ini bersifat temporer namun dampak yang diberikan tentu dapat bersifat permanen jika setiap aspek kerjasama dapat dilakukan

secara optimal dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pradiplomasi NTB dengan Kujawsko-Pomorskie menjadi penting untuk dilakukan mengingat saat ini NTB memiliki potensi yang besar dalam hal *sharing resources* dengan berbagai kota baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) NTB salah satunya, dengan sentralisasi ekonomi masyarakat NTB dapat memancing pihak luar untuk ikut andil berkontribusi membangun daerah dengan dalih seperti *sharing resources*. Dengan adanya paradiplomasi akan dapat memperkuat daerah (khususnya NTB) dalam meningkatkan potensi yang dimilikinya.

NTB sebagai suatu daerah yang memiliki beragam sumber daya telah banyak melakukan kerjasama internasional baik dalam bentuk paradiplomasi maupun *sister city*. Pemerintah NTB melakukan kerjasama pemerintahan dengan GIS Jerman (*deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit*) dalam upaya meningkatkan sumber daya seperti tenaga-tenaga ahli bagi pembangunan berkelanjutan (Devitayanti, 2018: 49). Pemerintah NTB juga melakukan kerjasama pemerintahan dengan *the Australian Skills Institute* dalam kepentingan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan dan sumber daya masyarakat dalam mendapatkan pengalaman kerja di Northern Territory (Kementerian Luar Negeri, 2019). Pemerintah NTB dan Denmark juga pernah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam sektor energi, lingkungan, dan investasi (Subandi, 2019).

Melalui sekian banyak pengalaman kerjasama pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah NTB, pada rentang tahun 2019 kerjasama yang paling diunggulkan

secara kuantitatif dan kualitatif adalah peradiplomasi NTB-Kujawsko Pomorskie yang dalam bidang pertukaran pelajar asal NTB. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini tertuang dalam RPJMD NTB Tahun 2019-2023 dalam program unggulan Gemilang Pendidikan dan Kesehatan yang terdiri dari, salah satunya: 1.000 cendekia Generasi Emas NTB, dan NTB Juara.

Selanjutnya, apakah kerjasama pemerintah wilayah NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia dalam program paradiplomasi dapat menuntaskan banyak permasalahan di atas, terutama dalam segi ekonomi dan pengembangan kualitas SDM masyarakat NTB. Mengingat program paradiplomasi ini sudah berjalan sejak tahun 2019, penting untuk dilihat sejauh mana efektivitas program-program yang terbentuk, dan hal ini tentu dapat kita ukur melalui kepentingan apa yang dibentuk oleh pemerintah wilayah NTB dalam membangun program paradiplomasi dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana kerjasama paradiplomasi pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan ini bermaksud untuk membahas bagaimana Kerjasama paradiplomasi antara Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini fokus pada bagaimana paradiplomasi NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia yang telah dimulai sejak tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Hal ini penting untuk dapat menilai menurunnya indeks pembangunan manusia di NTB yang setiap periode berada pada status stagnansi. Sebab bentuk kerjasama yang ingin dibentuk oleh kedua belah pihak adalah kerjasama dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan budaya. Jadi, melihat bagaimana kerjasama paradiplomasi pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia perlu untuk meninjau sejauh mana perkembangan paradiplomasi tersebut berdampak pada tujuan dan sasaran yang diinginkan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Eksplorasi yang diidentikkan dengan program paradiplomasi NTB dengan sub-negara bagian di berbagai negara telah dilakukan oleh beberapa ahli. Misalnya, ujian yang dipimpin oleh Raden Adityawarman (2020) dalam Mediasi: Jurnal Hubungan Internasional berjudul "Penyelidikan Paradiplomasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Victoria melalui Konsep At-Ta'awun dalam Pengembangan Lebih Lanjut Bidang Pendidikan Tahun 2017-2019" dalam penelitian ini. Kajian menunjukkan bahwa latihan-latihan yang dimanfaatkan Yogyakarta tidak terlepas dari komunikasi paradiplomasi yang dapat lebih mengembangkan daerah latihan. Hal ini ditegaskan dengan semakin meluasnya kerjasama di bidang persekolahan baik secara bebas sebelum MoU Sister Province dengan Victoria, atau termasuk pemerintahan lingkungan negara bagian setelah

penandaannya. Peningkatan ini terlihat dari kerjasama di bidang pelatihan dari sekolah hingga perguruan tinggi, misalnya, perdagangan siswa, bahasa dan ilustrasi sosial. Kemudian, pada saat itu, alih-alih itu, peningkatan luas sekolah di Yogyakarta merupakan spekulasi yang berlarut-larut untuk melahirkan generasi muda yang cerdas.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhany Putra Pratama (2019) dalam jurnal *Islamic World and Politics* yang berjudul “*Paradiplomacy Praktik paradiplomasi di Indonesia: a Lesson from West Nusa Tenggara Province in 2013-2018*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa faktor eksternal dan internal yang terdiri dari gabungan rasionalitas dan pengaruh individu dan birokrasi mempengaruhi tren paradiplomasi pariwisata halal oleh Tuan Guru Bajang dan pendidikan serta investasi oleh Dr. Zulkieflimansyah secara signifikan. Meskipun usaha untuk memaksimalkan potensi kebijakan telah dilakukan oleh kedua gubernur beserta pegawai administrasi mereka, kebijakan yang diterapkan belum sempurna dikarenakan kesalahan dan isu yang terkait dengan ketimpangan dan kurangnya manajemen yang mumpuni menjadi poin kritik oleh banyak orang.

Pemeriksaan terbaru dipimpin oleh Aelina Surya dan Ahmad S. Bukhari (2019) dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPSi)* berjudul "Buka dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia dengan Negara-negara Visegard". Tinjauan ini memperjelas bahwa kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah NTB dengan Polandia adalah sebagai strategi bisnis dengan upaya pemerintah NTB untuk mendesak Polandia untuk menempatkan sumber daya di wilayah fondasi, energi listrik, dan aset mineral di wilayah tengah Lombok dan Sumbawa. Selain itu,

saat ini Polandia telah menempatkan sumber daya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 50 MW di Lombok.

Merujuk pada kajian literatur di atas terdapat sedikit hasil penelitian yang membahas tentang kerjasama paradiplomasi NTB dengan Polandia terutama kerjasama NTB dengan program paradiplomasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menutupi celah kekosongan tersebut. Penelitian tentang kerjasama sub-state pemerintah daerah di Indonesia dengan sub-state negara lain cukup luas, namun dalam kasus NTB masih terdapat gap, yaitu kurangnya tinjauan literatur yang terekam di internet.

Dari berbagai jumlah penelitian yang menggambarkan bagaimana para diplomasi NTB dengan negara/sub-state lainnya secara umum lebih mengarah kepada bagaimana kebijakan-kebijakan yang mengatur kerjasama paradiplomasi NTB dengan pihak luar. Kemudian, kebijakan-kebijakan yang dibentuk lebih mengarah pada masalah energi terbarukan, infrastruktur, energi listrik, serta investasi secara umum. Sedangkan penelitian yang secara spesifik mengurai tentang program paradiplomasi NTB dengan Polandia masih minim dilakukan, penelitian yang menguraikan tentang hubungan paradiplomasi NTB dengan Polandia masih seputar arah perubahan kebijakan gubernur dalam melakukan pendekatan kerjasama paradiplomasi. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat bagaimana kerjasama paradiplomasi pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia.

1.6 Kerangka Pemikiran

Paradiplomasi merupakan sistem politik diplomasi yang tumbuh dan berkembang seiring kegagalan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan secara efektif. Sebab keputusan yang tidak efektif tersebut berdampak pada problem kemanusiaan di tingkat yang lebih rendah. Istilah paradiplomasi pertama kali dipresentasikan dalam diskusi skolastik oleh peneliti Basque Panayotis Soldatos selama tahun 1980-an. Penggunaan kata paradiplomacy dipilih sebagai pilihan yang bertolak belakang dengan istilah equal discretion yang menyinggung pentingnya strategi internasional non-vocal government. Panayotis Soldatos mengambil tata letak untuk tindakan hubungan asing yang dilakukan oleh negara bagian terdekat di Spanyol dengan berbagai legislatif lingkungan di Amerika Latin. Dalam setting autentik, kedua daerah tersebut memiliki asosiasi antusias yang memikat (Mukti, dalam Maksun dan Azmawati, 2020 hlm. 18).

Sebagaimana ditunjukkan oleh Mukti (2020, hlm. 1), paradiplomasi atau partisipasi asing yang dilakukan oleh negara-negara teritorial, baik otoritas provinsi maupun lokal/daerah umumnya masih merupakan kekhasan baru dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi menyinggung perilaku dan kemampuan untuk mengarahkan hubungan asing dengan pertemuan asing yang diselesaikan oleh elemen sub-negara bagian atau legislatif teritorial/negara bagian terdekat, sehubungan dengan keuntungan khusus mereka.

Menurut Kuznetsov (2015, p.111-113) terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh suatu wilayah yang berkepentingan, prinsip tersebut terurai dalam beberapa hal. *Pertama*, membentuk departemen yang secara khusus bertanggung jawab atas urusan kerjasama

internasional. *kedua*, Membuka kantor subnasional yang secara permanen berada di luar negeri. *Ketiga*, adanya kunjungan resmi yang dilakukan otoritas wilayah ke negara asing. *Keempat*, melakukan partisipasi pada acara internasional yaitu pameran, forum, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh aktor Asing. *Kelima*, pembentukan dan adanya partisipasi dalam jaringan dan kelompok kerja regional secara multilateral global dan lintas batas mengenai masalah-masalah yang spesifik seperti pertanian, pembangunan berkelanjutan, energi, transportasi, dll. *Keenam*, adanya partisipasi oleh otoritas wilayah dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh entitas asing dalam kegiatan delegasi resmi pemerintah pusat mereka.

Mukti (2020, hlm.13) mengungkap bahwa premis utama persoalan legislasi pada strategi pemerintah Indonesia bersumber dari UUD atau UUD 1945 Amandemen, yang kemudian digambarkan dalam berbagai item administrasi yang lebih khusus. Setelah UUD 1945, peraturan perundang-undangan luar biasa yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan asing adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan. Belum Terkenalnya Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Partisipasi Asing DPRD Provinsi yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, misalnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang upaya bersama yang tidak dikenal. Negara dilakukan oleh pemerintahan bersama dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2020.

Takdir Ali Mukti merujuk studi Duchacek (dalam Maksum & Azmawati, 2020, p. 21) menggambarkan tipe-tipe paradiplomasi yang ditempuh oleh sejumlah negara yang terbagi dalam 3 tipe. Pertama, transborder paradiplomacy. Praktik paradiplomasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah yang secara geografis memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah di Luar Negeri. Kedua, transregional paradiplomacy. Praktik paradiplomasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah yang berada dalam satu kawasan yang sama meskipun tidak memiliki perbatasan geografis secara langsung. Ketiga, global paradiplomacy. Praktik paradiplomasi ini dilakukan pemerintah daerah dengan tidak mempertimbangkan kedekatan geografis, tetapi lebih mempertimbangkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh ketika melakukan Kerjasama Internasional.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan konsep paradiplomasi yang telah diuraikan diatas, penulis menarik argument sementara bahwa Pemerintah NTB melakukan Kerjasama dengan Kujawsko melalui:

- a. Pembentukan Departemen Kerjasama internasional.
- b. Melakukan kunjungan resmi yang dilakukan otoritas wilayah ke negara asing.
- c. Berpartisipasi dalam berbagai acara internasional seperti forum ataupun pameran yang diselenggarakan oleh aktor asing.
- d. Pembentukan dan adanya partisipasi dalam jaringan dan kelompok kerja regional secara multilateral global dan lintas batas mengenai masalah-

masalah yang spesifik seperti pertanian, pembangunan berkelanjutan, energi, transportasi, dll.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam konfigurasi eksplorasi ini adalah eksplorasi subjektif. Bagi Creswell (2014. p.xiv) eksplorasi subjektif melengkapi teknik pengumpulan, penguraian, dan penguraian informasi, seperti halnya menyusun hasil penelitian yang tidak persis sama dengan strategi kuantitatif biasa. Pemeriksaan yang bertujuan, membuka berbagai informasi, pemeriksaan pesan atau gambar, menampilkan data sebagai gambar dan tabel, dan terjemahan individu dari penemuan-penemuan. Dengan adanya sifat analisis teks dalam penelitian kualitatif, peneliti rasa rancangan penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian ini, yakni untuk melihat bagaimana teks dalam media digital menyumbangkan ketakutan terhadap masyarakat.

Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan *Grounded Theory* (Creswell, 2014. p. 19) dimana di dalam penyajian data menggunakan pemaparan-pemaparan dan gambaran, karena peneliti hanya ingin menggambarkan situasi dan peristiwa. Dengan adanya pendekatan ini, peneliti rasa akan mampu menggambarkan bagaimana interaksi-interaksi yang terbentuk dari paradiplomasi yang dibangun oleh pemerintah wilayah NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia dan kepentingan apa saja yang terjadi dalam hubungan paradiplomasi tersebut.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan yaitu teori analisis wacana kritis Fairclough. Sehingga objek penelitian ini adalah program-program yang telah dibentuk oleh pemerintah wilayah dengan program paradiplomasi nya dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia.

Sedangkan subjek penelitian menurut Moleong (2010. p. 132) sebagai informan yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah wilayah atau yang berkepentingan dalam program paradiplomasi pemerintah wilayah NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alasan memilih metode ini untuk memperoleh hasil dan temuan data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Observasi kualitatif (Creswell, 2014. p. 254) adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam hal ini individu akan diwakilkan oleh data primer dan data sekunder yang tergambar dalam muatan informasi yang ada pada pemberitaan media digital, dan lapangan yang dimaksud akan diwakilkan dengan media-media online atau platform-platform online yang menjadi sumber pemberitaan.

Agar penelitian ini dapat berhasil, maka pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting. Metode berikutnya adalah wawancara, penelitian akan melakukan tanya jawab dengan bertatap muka langsung kepada Kepala Bidang Kerjasama Luar Negeri NTB, Dinas KUMKM, pelaku kerjasama dengan mengacu pada pertanyaan terbuka yang telah dipersiapkan. kemudian berikutnya adalah pengumpulan data dengan metode dokumentasi, peneliti akan merangkum data-data temuan atau data-data yang sudah ada sebelumnya sebagai penguat metode-metode sebelumnya yaitu, observasi dan wawancara. Data dokumentasi dapat berbentuk teks, audio, maupun video. Selama proses penelitian, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya koran digital, makalah, laporan) ataupun dokumen privat (buku harian, surat, e-mail).

1.8.4 Proses Penelitian

Gambaran pelaksanaan penelitian dalam rancangan penelitian ini akan digambarkan dalam beberapa langkah:

Tahap 1. Memproses dan merencanakan informasi untuk investigasi. Perkembangan ini meliputi penerjemahan informasi, pengecekan bahan, penyusunan informasi lapangan, atau penyusunan dan penyatuan informasi ke dalam berbagai macam sumber data.

Tahap 2. Membaca dengan teliti seluruh informasi. Langkah awal adalah mengumpulkan perasaan keseluruhan dari data yang diperoleh dan memikirkan signifikansi umumnya. Apa pemikiran umum yang terkandung dalam informasi, apa pemikiran, bagaimana kesan kedalaman, kepercayaan, dan akurasi data.

Tahap 3. Memulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks) dan menuliskan kategori dalam batas-batas.

Tahap 4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, data, kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan penyampaian informasi secara detail mengenai data, sumber data, atau peristiwa tertentu.

Langkah 5. Menunjukkan deskripsi dan tema-tema dengan menyajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Dalam hal ini laporan hasil penelitian akan menjadi satu laporan utuh/temuan sementara yang telah dilakukan melalui metode pengumpulan data: observasi dan dokumentasi.

Langkah 6. Langkah terakhir yaitu pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II mengelaborasi konteks tentang potensi NTB dan kiprah NTB dalam sejumlah Kerjasama internasional atau paradiplomasi dengan pemerintah daerah di negara lain.

Bab III menjelaskan tentang Kerjasama paradiplomasi antara Pemerintah Daerah NTB dengan Pemerintah Kujawsko, yang meliputi; (judul dari sub bab).

Bab IV adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi atau masukan, baik bagi Pemda NTB dan Pemerintah Pusat untuk pengembangan paradiplomasi.



BAB 2

Profil NTB dan Kujawsko serta Potensi Kerja sama antar Kedua Provinsi

Pada Bab ini diuraikan mengenai profil Nusa Tenggara Barat sebagai suatu wilayah administrasi dan demografi yang memiliki substansi terkait kerjasama dengan pihak luar negeri yang dalam hal ini adalah pemerintah Kujawsko Pomorskie. Profil Kujawsko Pomorskie juga diuraikan dalam aspek kepentingan Kerjasama, seperti potensi yang dapat mengikat Kerjasama, kepentingan yang dapat mengikat Kerjasama, hingga beberapa data yang mendukung Kerjasama atau paradiplomasi Pemda NTB dengan Kujawsko Pomorskie.

2.1. Profil Provinsi NTB

Sebelum menjadi suatu daerah, NTB penting bagi Negara Indonesia Timur pada awal terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat dan ternyata penting bagi Wilayah Sunda Kecil setelah diakuinya kekuasaan Republik Indonesia. Bersamaan dengan unsur-unsur peristiwa tersebut dan setelah mengalami beberapa siklus perubahan kerangka yang telah mapan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuklah Daerah NTB. Daerah ini telah berwibawa dengan keadaan ruang seperti sekarang ini, dimulai sekitar tahun 1958, diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 pada tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swasta Tingkat I di Bali, NTB dan Daerah Timur. Nusa Tenggara dan yang menjadi wakil ketua pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara sah Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, organisasi kekuasaan publik itu berjalan dengan berpedoman pada Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. . Keadaan tertutup ini berlangsung hingga 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa ditukar. Hari likuidasi ini menandakan pengaturan kewenangan Daerah NTB. Zaman terus berubah, pepadatan kekuatan dan pemerintahan terus terjadi.

Luas daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan 49. 312. 19 km² yang dimana terdiri dari daratan seluas 20. 153, 15 km²(40, 87%) serta perairan laut seluas 29. 159, 04 km²(59, 13%) dengan garis tepi laut 2. 333 kilometer. Ada 2 antara daratan utama, khususnya Lombok Daratan dengan luas 4.738,70 km² (23,51%) dan Sumbawa dengan luas 15.414,5 km² (76,49%) yang dilingkupi 378 dataran kecil. Secara geografis, Kabupaten Nusa Tenggara Barat terletak antara 115°46-119°05 Bujur Timur dan 8°10-9°5 Lintang Selatan dengan batas ke arah utara Laut Jawa dan Laut Flores, ke arah selatan Samudera Hindia. , ke arah barat Selat Lombok. seperti Wilayah Bali dan bagian timur Selat Sape dan Wilayah Nusa Tenggara Timur (Biro Administrasi Kerjasama Setda NTB, 2019).

Tabel 2. 1 Luas Daerah Wilayah NTB Menurut Daratan Tahun 2018

PULAU	LUAS (KM2)	PERSENTASE
Lombok	4.738,70	23,51
Sumbawa	15.414,5	76,59
NTB	20.153,2	100,00

Sumber: Statistik Daerah Wilayah NTB Tahun 2018

Secara Administratif Wilayah NTB terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan.

Kemajuan penduduk di Wilayah NTB terus berkembang dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013 hingga tahun 2017, jumlah penduduk di NTB menunjukkan gambaran peningkatan yang cukup besar karena kelahiran normal dan peningkatan. Berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 (data aksi), jumlah penduduk absolut di Wilayah NTB pada tahun 2017 adalah 4.955.578 orang, terdiri dari 2.405.080 laki-laki dan 2.550.498 orang dewasa. Jumlah penduduk di NTB lebih banyak didominasi oleh dewasa daripada pria, tetapi tingkatan pertumbuhan penduduk pria lebih besar awasang dengan tingkatan pertumbuhan penduduk dewasa (Biro Administrasi Kerjasama Setda NTB, 2019).

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Wilayah NTB Tahun 2013-2017

Tahun	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
2013	2.244.721 (48,48%)	2.385.581 (51,52%)	4.630.302 (100%)	1.41	1.35	1.38	94.1
2014	2.315.234 (48,50%)	2.458.561 (51,50%)	4.773.795 (100%)	1.37	1.31	1.34	94.17
2015	2.345.811 (48,51%)	2.489.766 (51,49%)	4.835.577 (100%)	1.32	1.27	1.29	94.22
2016	2.375.750 (48,52%)	2.520.412 (51,48%)	4.896.162 (100%)	1.28	1.23	1.25	94.26
2017	2.405.080 (-48,53)	2.550.498 (-51,47)	4.955.578 (100%)	1.23	1.19	1.21	94.3

Sumber : BPS Wilayah NTB

Ketebalan penduduk yang paling menonjol pada tahun 2017 adalah Kota Mataram, yaitu 7.642, 89 individu/km², disusul Kota Bima dengan ketebalan 801, 96 individu/km². Ketebalan yang sangat besar terjalin di wilayah metropolitan.

Selain menetapkan Kawasan Strategis Wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Wilayah NTB juga menetapkan kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa
- b. Kawasan ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- c. Kawasan ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima;
- d. Kawasan ekosistem Daratan Sangiang berada di Kabupaten Bima.
- e. Pengelolaan wilayah pesisir dan Daratan-daratan Kecil dikelompokkan dalam 15 (lima belas) awasan pengelolaan, yaitu:
- f. Kawasan Gili Matra dan sekitarnya;
- g. Kawasan Senggigi dan Sekitarnya;
- h. Kawasan Lembar-Sekotong dan Sekitarnya;
- i. Kawasan Kuta-Awang dan sekitarnya;
- j. Kawasan Tanjung Luar-Jerowaru dan sekitarnya;
- k. Kawasan Gili Sulat-Labuhan Lombok dan sekitarnya;
- l. Kawasan Labuhan Lalar-Maluk dan sekitarnya;
- m. Kawasan Gili Balu – Alas dan sekitarnya;
- n. Kawasan Labuhan Badas-Daratan Moyo dan Sekitarnya;

- o. Kawasan Teluk Saleh;
- p. Kawasan Teluk Sanggar dan Sekitarnya;
- q. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya;
- r. Kawasan Sape dan Sekitarnya;
- s. Kawasan Teluk Waworada dan Sekitarnya;
- t. Kawasan Teluk Cempi dan Sekitarnya.

Gambar 2. 1 Rencana tata Ruang Wilayah Prov. NTB Tahun 2009-2029



Sumber: Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB, 2019

2.2. Profil Kujawsko Pomorskie

Dalam dokumen kajian Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB (2019) nama negara Republik Polandia, ibukota Warsawa. Lambang negara adalah Burung Garuda dengan Mahkota. Bentuk Negara Republik dan memiliki luas wilayah 312.685 km² (1,4% dari luas wilayah Eropa). Letak Geografis berada pada Eropa Tengah, dengan perbatasan Timur yaitu Ukraina, Belarus, Lithuania dan Rusia. Bahasa nasionalnya adalah Polandia.

Sampai kuartal ketiga tahun 2018 perdagangan luar negeri Polandia mengalami peningkatan, di mana menurut Kementerian Ekonomi Polandia , jumlah

ekspor mencapai Euro 107,4 milyar atau meningkat sebesar 6 miliar Euro dalam periode yang sama tahun 2007. Produk Polandia sebagian besar diekspor ke negara-negara UE, seperti Jerman, Italia, Perancis, Inggris, Belanda, Rusia, Ukraina, dan Ceko. Komoditi utama yang diekspor antara lain: daging, batubara, besi dan baja, tembaga, pesawat udara dan produk dari karet.

Nilai impor Polandia hingga bulan November 2018 tercatat sebesar 129,7 miliar Euro atau meningkat 8 milyar Euro pada periode yang sama tahun 2017. Dari jumlah tersebut, impor Polandia yang terbesar berasal dari Jerman, Rusia, Italia, Perancis dan Cina. Komoditi-komoditi yang diImpor antara lain adalah: karet, produk plastik, produk farmasi, alas kaki, kayu dan produk kayu, produk tekstil.

Kujawsko-Pomorskie, juga dikenal sebagai Voivodeship Kuyavian-Pomeranian atau Wilayah Kujawy-Pomerania. kujawsko-pomorskie adalah salah satu dari 16 voivodeship (wilayah) di Polandia. Berdiri pada 1 Januari 1999 dan terletak di Polandia utara-tengah, di perbatasan antara dua wilayah bersejarah dari mana ia mengambil namanya: Kuyavia (Polandia : Kujawy) dan Pomerania (Polandia : Pomorze). Dua kota utamanya, yang berfungsi sebagai ibukota bersama wilayah, adalah Bydgoszcz dan Toruń .

Provinsi Kuyavian-Pomeranian ditetapkan pada 1 Januari 1999, karena perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terdekat Polandia pada tahun 1998. Wilayah ini terdiri dari domain Wilayah Bydgoszcz sebelumnya, Toruń dan Włocławek.

Daerah yang sekarang dikenal sebagai Kuyavia-Pomerania sebelumnya dibagi antara wilayah Kuyavia dan wilayah kekuasaan kerajaan Polandia Prusia .

Dari dua kota utama voivodeship Kuyavian-Pomeranian saat ini, satu (Bydgoszcz) secara historis terletak di Kuyavia, sementara yang lain (Toruń) adalah kota penting Kerajaan Prusia.

Fungsi ibukota regional dibagi antara Bydgoszcz dan Toruń. Bydgoszcz berfungsi sebagai kantor pemerintahan gubernur atau voivode yang ditunjuk secara terpusat (Polandia : wojewoda), sementara Toruń adalah kantor dari Majelis Regional terpilih (sejmik), dan eksekutif yang dipilih oleh majelis itu, dipimpin oleh voivodeship marshal (Ewa Monika Mes).

Voivodeship Kuyavian-Pomeranian dibatasi oleh lima voivodeship lainnya. Ini adalah Wilayah Pomeranian di utara, Wilayah-Warmian-Masurian di utara-timur, Wilayah-Moskow Di timur, Łódź Wilayah di seberang batas pendek di selatan, dan Wilayah Polandia di selatan dan barat.

Infrastruktur transportasi sangat penting bagi perekonomian voivodeship. Kuyavia-Pomerania adalah simpul utama dalam sistem transportasi Polandia. Jalur kereta api dari Selatan dan Timur melewati Bydgoszcz untuk terhubung ke pelabuhan utama di Laut Baltik. Selain itu, Bydgoszcz adalah rumah bagi produsen rolling stock PESA SA, produsen produk kereta api dan trem terbesar dan paling modern di Polandia. Bandara internasional satu-satunya di wilayah itu, Bandara Ignacy Jan Paderewski, terletak di Bydgoszcz dan memiliki koneksi ke sejumlah tujuan Eropa serta Warsawa, yang semuanya dioperasikan oleh operator Irlandia Ryanair atau LOT Polish Airlines.

Stasiun kereta api utama wilayah adalah stasiun utama Bydgoszcz dan stasiun utama Toruń; kedua stasiun dilayani oleh kereta cepat PKP Intercity yang menghubungkannya dengan ibukota Warsawa, serta kota-kota besar Polandia

lainnya. Selain layanan kilat cepat ini, kereta api antar-wilayah dioperasikan oleh perusahaan Przewozy Regionalne , sementara transportasi kereta api domestik dalam voivodeship disediakan oleh Arriva RP , sebuah perusahaan swasta tempat pemerintah wilayah mensubkontrakkan penyediaan transportasi kereta api. Semua kota besar di wilayah ini memiliki perusahaan angkutan kota yang mengoperasikan bus, sementara Bydgoszcz , Toruń dan Grudziądz juga memiliki sistem trem yang luas.

Pemerintah voivodeship Kuyavian-Pomeranian dipimpin oleh wilayah voivode (gubernur) yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Polandia . Voivode tersebut kemudian dibantu dalam melakukan tugasnya oleh marshal voivodeship, yang merupakan pembicara yang ditunjuk untuk eksekutif voivodeship dan dipilih oleh sejmik (majelis wilayah) . Voivode Kuyavia-Pomerania saat ini adalah Ewa Monika Mes , dan marshal saat ini adalah Piotr Całbecki. Sejmik Kuyavia-Pomerania terdiri dari 33 anggota.

Wilayah Kuyavian-Pomeranian dibagi menjadi 23 kabupaten (powiats) dan 4 kabupaten kota dan 19 kabupaten daratan. Ini selanjutnya dibagi menjadi 144 gminas.

Melihat indikator kunci paling penting di kawasan kujawsko-pomorskie, produk domestik bruto (PDB) kawasan ini telah mengalami pertumbuhan moderat dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan mencapai € 18,89 miliar pada 2016, yang merupakan 4,4% dari PDB nasional (Eurostat 2017). Pada tahun itu, PDB per kapita adalah 16.300 (PPS), jelas di bawah rata-rata nasional 19.900 dan setara dengan 56% dari rata-rata UE.

Pada 2015, entitas yang terlibat dalam layanan menghasilkan 58,8% dari nilai tambah regional bruto (GVA), agak di bawah rata-rata nasional 62,5%, sedangkan industri menghasilkan 29,8%, yang terakhir sedikit di atas rata-rata nasional 27,2% (Kantor Pusat Statistik 2016) , GDP dan GVA oleh voivodeships and subregions 2010 2015).

Wilayah ini ditandai terutama oleh industri tradisional, basis penelitian ilmiah yang kuat, produksi pertanian yang efisien, dan kapasitas pengolahan makanan yang berkembang dengan baik. Sektor industri dengan potensi pengembangan tinggi termasuk elektronik yang didukung terutama oleh universitas di Bydgoszcz dan Torun dengan beberapa pusat transfer teknologi. Selain itu, sektor elektromekanis diwakili oleh sejumlah besar perusahaan, dan fakultas elektro-teknis yang berlokasi di lembaga penelitian ilmiah regional memainkan peran penting. Contoh konkret lainnya dari sektor-sektor dengan potensi besar termasuk sektor kimia, manufaktur agro-pangan dan fasilitas ilmiah terkait.

Meskipun kemajuan moderat dibuat dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini masih dianggap sebagai yang terkecil dari pasar industri yang lebih signifikan di Polandia. Ini juga terkait dengan terbatasnya kehadiran investor asing. Pada pertengahan 2018, ada 1.975 perusahaan asing di wilayah ini (11,2% dari total), sedikit meningkat dibandingkan dengan jumlah tahun 1961 pada tahun 2017, tetapi masih hanya sekitar 2% dari 95.849 perusahaan asing di Polandia (Central). Kantor Statistik Polandia 2018 Perubahan struktural dalam register REGON ekonomi nasional.

2.3. Potensi Kerja Sama Antara NTB dengan Kujawsko

2.3.1 Potensi NTB

Dalam dokumen kajian Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB (2019) NTB terletak di lokasi yang strategis dari wilayah tengah Indonesia sehingga menjadikan wilayah ini menjadi pusat pelayanan untuk wilayah tengah di Indonesia dan skala internasional, dengan bentang alam yang indah dan berbagai macam suku yang tinggal di NTB membuat Wilayah ini memiliki kebudayaan yang bervariasi dan menarik sehingga memberikan potensi kerjasama yang sangat menjanjikan di bidang yang terkait dengan kerjasama paradiplomasi NTB-Kujawsko Pomorskie, beberapa di antaranya :

2.3.1.1 Pariwisata

Sebagai ruang yang terbungkus lautan, kreasi perikanan NTB terus berkembang, khususnya perikanan lautnya. Produksi ikan laut pada tahun 2015 mencapai 170.167 ton, meningkat 17,06 persen dibandingkan tahun 2014. Perikanan darat pengganti di NTB diungguli oleh perkembangan hidroponik air asin (danau), yang sebagian besar berada di Kabupaten Sumbawa. ikan-ikan seperti kerapu, layang-layang, teri, tembang, lemuru, tenggiri, cakalang, ikan, kepiting, ubur-ubur, ikan tenggiri dan cumi-cumi. Inilah hasil perikanan laut yang fundamental bagi NTB. Daerah Palsu Perikanan Laut Terbentang di Utara 8 Asas dan 2 Organisasi Metropolitan di Wilayah NTB.

2.3.1.2 Pendidikan

Sebagai daerah yang kualitas dan mutu pendidikan tergolong cukup rendah dan tertuang dalam Buku Indeks Pembangunan Manusia Badan Pusat Statistik, pembangunan IPM Indonesia pada tahun 2020 mengalami jeda yang sangat besar

dengan hanya berkembang sebesar 0,03 persen, jauh lebih lambat dari perkembangan tahun sebelumnya sebesar 0,74 persen, sehingga pemerintah NTB dirasa perlu untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mengedepankan kualitas pendidikan masyarakat.

2.3.2 Potensi Kujawsko

Kujawsko-Pomorskie, juga dikenal sebagai Voivodeship Kuyavian-Pomeranian atau Wilayah Kujawy-Pomerania. Kujawsko-pomorskie adalah salah satu dari 16 voivodeship (wilayah) di Polandia. Berdiri pada 1 Januari 1999 dan terletak di Polandia utara-tengah, di perbatasan antara dua wilayah bersejarah dari mana ia mengambil namanya: Kuyavia (Polandia : Kujawy) dan Pomerania (Polandia : Pomorze). Dua kota utamanya, yang berfungsi sebagai ibukota bersama wilayah, adalah Bydgoszcz dan Toruń.

Terdapat empat universitas dan beberapa lembaga pendidikan tinggi lainnya yang ada di Kujawsko-pomorskie. Antara lain Universitas Teknologi dan Ilmu Kehidupan di Bydgoszcz (satu-satunya yang mendidik insinyur dan melakukan penelitian yang bersifat teknologi ketat), Kazimierz Wielki University di Bydgoszcz dan Universitas Nicolaus Copernicus di Torun dengan Collegium Medicum di Bydgoszcz. Taman sains dan teknologi penting termasuk Pusat Teknologi Modern Interdisipliner (ICNT) dan Badan Inovasi Regional – (KPAI).

Pengeluaran penelitian dan pengembangan (R & D) bruto (GERD) adalah € 87,09 juta untuk wilayah tersebut pada tahun 2015, sebesar 0,46% dari PDB, yang berarti peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya dengan hanya 0,34%. Sementara ada tren yang berkembang dari waktu ke waktu dibandingkan dengan 2008 ketika hanya 0,22% dihabiskan, ini masih jauh dibawah negara dan rata-rata

Uni Eropa diperkirakan 1,0% dan 2,04% pada tahun yang sama (Eurostat, 2018). Pendanaan litbang dari sektor bisnis berjumlah € 55,56 juta, yang berarti bagian dari 53,9% dari GERD, tetapi hanya 0,30% dari PDB regional dan tertinggal dari daerah lain seperti Pomorskie dan Mazowieckie yang menghabiskan lebih dari 3 dan 4 kali lipat dari masing-masing (Kantor Pusat Statistik Polandia, Laporan Sains dan Teknologi 2015). Meskipun demikian, sektor bisnis pada tahun 2015 memberikan kontribusi 53,9% dari total untuk wilayah tersebut, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional tahun itu - 46,6% (Kantor Pusat Statistik Polandia, 2017).

Tingkat pendidikan di kujawsko-pomorskie lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional dan Uni Eropa dalam hal pendidikan tersier. Pada 2017, 35,6% orang berusia 30-34 tahun memiliki setidaknya tingkat pendidikan yang sangat atas di sandingkan dibandingkan dengan Uni Eropa 39,9% (Eurostat, 2018). Namun, gambarannya lebih rumit ketika melihat gender karena hanya 27,0% laki-laki berusia antara 30-34 tahun telah menyelesaikan pendidikan tersier yang jauh di bawah rata-rata nasional yang sudah rendah yaitu 36,3% dan rata-rata UE sebesar 34,9%. Perempuan relatif jauh lebih baik dengan angka 44,8, yang berada di bawah rata-rata nasional 55,5% tetapi sama dengan rata-rata UE masing-masing 44,9 (Eurostat, 2018).

2.3.3 Kesamaan Antara NTB dengan Kujawsko Pomorskie

Keputusan Provinsi NTB untuk menjalin Kerjasama dengan Kujawsko Pomorskie didasari oleh beberapa kesamaan yaitu, kesamaan kedudukan administratif dan kemiripan karakteristik seperti:

- a. Adanya persamaan kedudukan dan status administrasi
- b. Adanya kesamaan ukuran/luas wilayah dan fungsi

- c. Adanya kesamaan karakteristik
- d. Adanya kesamaan permasalahan
- e. Adanya kondisi saling melengkapi antara kedua belah pihak

Provinsi NTB merupakan salah satu ruang di kawasan industri wisata, NTB memiliki potensi yang luar biasa, banyak keberatan dan berbagai daftar potensi industri wisata, mulai dari Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora Kepulauan (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, daya tarik Gili-gili, memiliki banyak sekali adat istiadat, ekspresi dan budaya, sejarah dan masyarakat yang menciptakan industri. Peningkatan industri perjalanan memiliki komitmen besar untuk pergantian peristiwa keuangan lokal, memperluas bantuan pemerintah daerah setempat dan pembayaran provinsi.

Sedangkan Kujawsko-Pomorskie – Republik Polandia merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata di bidang arsitektur dan destinasi wisata desa kuno sebagaimana desa-desa adat di Lombok dan Sumbawa.

2.4. Kepentingan NTB Dalam Kerja Sama Paradiplomasi dengan Kujawsko Pomorskie

Hubungan Kerjasama Pemda NTB-Kujawsko Pomorskie didasar pada dua hal penting yaitu, *pertama* kedekatan emosional gubernur Dr. Zulkieflimansyah dengan mantan duta besar. Dan *kedua*, kebutuhan internal yang berkaitan dengan keinginan Pemda NTB untuk meningkatkan kualitas SDM NTB. Menurut Hans J. Michelman (dalam Maksum & Azmawati, 2020: 20-21) mengungkapkan bahwa motif paradiplomasi anantara provinsi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yang berkaitan dengan hubungan Pemda NTB-Kujawsko Pomorskie

adalah; dorongan dari realitas objektif, seperti perbedaan lokasi geografis, kekhasan budaya, penggunaan Bahasa, dan agama. Dari hal ini dapat kita lihat bagaimana demografi sosial masyarakat NTB berkaitan erat dalam hal kekhasan budaya, bahasa, dan agama. NTB sendiri yang masyarakatnya hidup dalam keberagaman budaya diantaranya suku sasak, sumbawa, dan bima.

Berikutnya oleh sebab dinamika ekonomi dan kelembagaan pemerintah yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu menjalankan peran lebih banyak untuk pencapaian kepentingan regional. Tidak semua kebijakan yang terkait dengan promosi budaya dan peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat NTB dapat dipenuhi oleh kebijakan pemerintah pusat, sehingga Pemda NTB harus mampu melihat peluang yang lebih luas terkait dengan peningkatan kedua hal tersebut. Salah satu strategi yang dapat diandalkan adalah dengan melakukan Kerjasama antar provinsi secara internasional yaitu dengan pemerintah Kujawsko-Pomorskie. Peluang ini didapati dapat meningkatkan peluang yang lebih besar terkait dengan promosi pariwisata dan khususnya terkait dengan peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat NTB.

Meningkatnya desentralisasi politik luar negeri sebagai bagian dari proses demokratisasi politik dalam negeri yang memungkinkan pemerintah daerah secara konstitusional dapat melakukan praktik hubungan luar negeri. Dan salah satu kepentingan yang unggul yang dapat dilaksanakan oleh Pemda NTB dengan Kujawsko Pomorskie adalah dalam hal Pendidikan.

Jumlah mahasiswa asal Indonesia yang belajar ke Kujawsko-Pomorskie – Republik Polandia masih sedikit, hal ini disebabkan Kujawsko-Pomorskie – Republik Polandia belum menjadi destinasi pendidikan favorit di Polandia, padahal

di Kujawsko-Pomorskie – Republik Polandia terdapat beberapa Universitas yang cukup terkenal salah satunya adalah Nicolaus Copernicus University, kampus tertua dan terbesar di wilayah ini begitu juga sebaliknya di Wilayah NTB terdapat beberapa Universitas yang cukup bergengsi salah satunya adalah Universitas Mataram yang memiliki beberapa fakultas unggulan.

Wilayah NTB mencoba membuka peluang kerjasama antara Wilayah NTB dan Kujawsko-Pomorskie – Republik Polandia melalui beasiswa pendidikan maupun pertukaran pelajar sehingga hubungan antara kedua wilayah dapat terjalin lebih erat.

Mengingat hipotesis keputusan berkepala dingin yang memiliki definisi yaitu "Alasan yang dapat diabaikan untuk pengaturan aktivitas sosial adalah dua penghibur, masing-masing mengendalikan atau mengendalikan aset yang menarik pertimbangan pertemuan atau penghibur yang berbeda. Pertimbangan satu pihak terhadap aset yang sangat dipengaruhi oleh pihak lain membuat kedua pemain terlibat dengan kebutuhan bersama, sebagai penghibur dengan tujuan, masing-masing bermaksud untuk memperkuat pengakuan kepentingan yang menggambarkan hubungan atau kualitas mendasar dari kegiatan mereka. Hipotesis keputusan normal juga menjelaskan bahwa pilihan dibuat setelah mengukur manfaat dan hambatan yang akan mampu. Pemerintah Daerah NTB mempertimbangkan dan mengkaji keuntungan yang dapat diperoleh dalam kerjasama Para-tact dengan Kujawsko-Pomorskie – Republik Polandia. Pemkab NTB untuk situasi ini berjalan sebagai entertainer yang memiliki tujuan dan kepentingan dalam menyelesaikan suatu kerjasama. Kabupaten NTB memahami potensi yang digerakkan oleh Kujawsko-Pomorskie – Republik Polandia atau

dalam hipotesis ini dikenal sebagai aset. Dengan aset-aset tersebut, Pemda NTB berpikir bahwa partisipasi Paradiplomasi dengan Kujawsko-Pomorskie – Republik Polandia akan menghasilkan manfaat bagi kemajuan Wilayah NTB. Wilayah NTB melihat bahwa Kujawsko-Pomorskie merupakan sebuah Wilayah yang berperan penting dalam perekonomian Polandia. Pemerintah Wilayah telah memulai gerakan perintis untuk mendukung diversifikasi bisnis internasional, seperti mengirim misi ke luar negeri untuk pertukaran ekonomi dan pameran dagang lokal asing, mengadakan pameran internasional dan pertemuan bisnis, memprakarsai peluang untuk transaksi di luar negeri, dan mendukung perusahaan untuk menghadiri pameran dagang di luar negeri. Selain itu sudah terjalin kerja sama bidang pendidikan antara Wilayah NTB dengan Kujawsko-Pomorskie, terbukti dengan jumlah pengiriman mahasiswa sebanyak 76 orang (Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB 2019).

K.J Holsti mencirikan kolaborasi di seluruh dunia sebagai setidaknya dua kepentingan, nilai atau tujuan yang bertemu satu sama lain dan menghasilkan sesuatu, maju atau puas oleh semua pertemuan segera. Pandangan atau keinginan suatu negara bahwa strategi yang dipilih oleh negara yang berbeda akan membantu negara tersebut dengan memuaskan dan mencapai kecenderungan dan kualitasnya, pengaturan atau masalah tertentu antara setidaknya dua negara untuk memanfaatkan kesamaan kepentingan atau situasi yang tidak dapat didamaikan, prinsip atau pedoman resmi . pertukaran kasual sehubungan dengan pertukaran masa depan yang diselesaikan untuk melakukan pengaturan, pertukaran antar negara untuk memenuhi pengaturan mereka.

Daerah NTB melihat bahwa pergantian peristiwa dan kemajuan lokal adalah sesuatu yang harus dilakukan secara ideal. Kolaborasi asing atau partisipasi global merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemda NTB untuk mewujudkan visi dan misi Daerah NTB. Untuk situasi ini, kerjasama Paradiplomasi Wilayah NTB dengan Kujawsko-Pomorskie - Republik Polandia merupakan salah satu upaya Wilayah NTB untuk lebih terlibat dalam hubungan global dan untuk mencapai kepentingan lokal.

Pedoman mengenai kerjasama Luar Negeri yang telah dibuat sesuai dengan terbitnya UU tentang kemerdekaan wilayah yang terus di-refresh hingga UU No. 23 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, badan legislatif yang berdekatan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan jaringan lingkungan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara teritorial juga memiliki kekuatan untuk membuat aturan-aturan untuk bekerja sama dengan perusahaan/organisasi di luar negeri.

BAB 3

Paradiplomasi antara NTB dengan Kujawsko

Bab 3 membahas tentang perjalanan paradiplomasi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kujawsko-Pomorskie Polandia. Pada bab ini diuraikan temuan-temuan secara terperinci mulai dari adanya Biro Kerjasama Pemda NTB sebagai Langkah awal komunikasi hubungan paradiplomasi. Kemudian kunjungan resmi yang dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Daerah NTB ke Polandia untuk membentuk kesepakatan kerjasama. Secara garis besar, optimalisasi kerjasama Pemda NTB-Kujawsko Pomorskie pada aspek Pendidikan yaitu, mengirim mahasiswa S2 untuk melanjutkan studi ke beberapa perguruan tinggi yang ada di Kujawsko-Pomorskie Polandia. Dalam aspek ini, Pemda NTB mengharapkan meningkatnya kualitas SDM NTB dalam bidang Pendidikan dengan memberikan peluang untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Aspek lainnya yang menjadi target kerjasama ialah promosi budaya, namun kendala banyak terjadi oleh sebab pandemic Covid-19 yang melanda dunia sehingga banyak program yang tidak dapat berjalan dengan baik. Namun meski demikian, manfaat Kerjasama ini tetap dapat memberikan kontribusi bagi NTB dan khususnya bagi masyarakat NTB yaitu beberapa mahasiswa dapat lulus seleksi pada program Erasmus dan hal ini menunjukkan kontribusi NTB pada event internasional

3.1. Adanya Biro Kerja sama sebagai Langkah Awal Paradiplomasi NTB

Menurut Kuznetsov (2015, 58) salah satu prinsip dalam paradiplomasi adalah adanya Lembaga atau biro khusus dalam pemerintahan daerah (sub-state) yang berwenang untuk mengurus kerja sama internasional. Dalam hal ini, NTB

memiliki Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTB dibentuk pada tahun 2018 dalam hal ini termuat pada Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah juga pada Peraturan Gubernur NTB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan ditetapkannya dua jenis aturan di atas maka semua kegiatan maupun program pemerintah yang berkaitan dengan Kerjasama yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh perangkat pemerintah dengan pihak lain diwajibkan melalui fasilitas Biro Administrasi Kerjasama. Biro ini sebelumnya sempat vakum selama dua tahun, pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang pada saat tersebut biro ini bernama Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam (Kesda & SDA) yang berdiri sejak tahun 2016.

Dalam visi dan misinya, Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTB mengusung visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” dan hal ini juga seirama dengan gambaran besar kebijakan pemerintah provinsi NTB di bawah kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah yang mengusung jargon “NTB Gemilang”. Selanjutnya, sesuai dengan visi tersebut Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTB membentuk Misi perbaikan NTB 2019-2023 menyampaikan misi NTB Tangguh dan Mantap, melalui penguatan penanggulangan bencana dan pemajuan kerangka kerja dan jaringan wilayah. Kemudian, pada saat itu, NTB Bersih dan Melayani, melalui pergantian pemerintahan yang jujur, eksekusi yang elit, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berbakti. NTB Sehat dan Cerdas, melalui penggarapan fitrah SDM sebagai pembentukan Intensitas Provinsi. Asri dan NTB Berkelanjutan, melalui

pengelolaan aset dan ekologi yang berkelanjutan. NTB Sejahtera dan Mandiri, melalui pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pembangunan moneter yang komprehensif bergantung pada agribisnis, industri perjalanan, dan industrialisasi. Terakhir, NTB dilindungi dan disayangi, melalui pengakuan masyarakat umum yang memiliki kepercayaan, karakter, dan kesetaraan (Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB 2019).

Kewajiban dan unsur Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat adalah merinci materi pendekatan vital untuk pergantian acara dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Kerjasama Non Pemerintah serta pengendalian Kerjasama; merumuskan bahan/materi tentang teknis di bidang Kerjasama pemerintahan dan non pemerintahan serta pengendalian Kerjasama; menyelenggarakan penyiapan data, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mengenai Kerjasama pemerintah dan Kerjasama non pemerintahan serta pengendalian Kerjasama; memfasilitasi penyelesaian konsep naskah Kerjasama pemerintahan dan non pemerintahan; menyelenggarakan pengelolaan dan memfasilitasi Kerjasama; menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan program Kerjasama pemerintahan dan non pemerintahan; merumuskan rencana strategis, rencana kerja, RKA/DPA kegiatan biro; merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, memfasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Biro; mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan.

Sedangkan kapasitasnya adalah pendefinisian materi/materi dan koordinasi strategi kewilayahan di bidang organisasi partisipasi; rincian rencana strategi/program dan rencana pelaksanaan penugasan perangkat provinsi di bidang organisasi Kerjasama; mengamati dan menilai pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, dan pengumuman tugas di bidang organisasi Kerjasama; dan pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh prakarsa sesuai dengan bidang kewajiban dan kewenangannya.

Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTB sadar bahwa Kerjasama internasional bukan hanya kewenangan pemerintah pusat dengan begitu masing-masing provinsi termasuk Provinsi NTB dapat dengan leluasa membangun hubungan Kerjasama internasional yang lebih intensif dengan provinsi atau kota-kota di berbagai negara. Meski tentunya, kesepakatan Kerjasama dengan provinsi atau kota di negara lain harus melalui kesepakatan yang dikoordinasikan serta dikonsultasikan dengan pemerintah pusat (Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB 2019).

Dalam dokumentasi yang tercatat di website Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTB (2019, 25), pemerintah NTB menjalin komunikasi secara aktif dengan delegasi Polandia. Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menemui para delegasi dari Polandia di Katamaran Hotel untuk membahas peluang Kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah NTB dengan pemerintah Kujawsko-Pomorskie Polandia. Kerjasama yang dapat dilakukan salah satu diantaranya adalah dalam bidang Pendidikan, dimana pemerintah NTB ingin dapat mengirimkan mahasiswa asal NTB ke Kota Torun dengan bekerjasama dengan 3HK (Institute of Sustainable Development EU-Asean).

Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTB melakukan banyak pendataan terkait dengan hubungan Kerjasama internasional pemerintah NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia seperti yang tertuang dalam websitenya. Juga membuat laporan administrasi terkait berita, data-data, dan

dokumentasi kegiatan Kerjasama pemerintah provinsi dengan Polandia, dan dengan negara lainnya secara umum. Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTB juga merekomendasikan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB untuk mensukseskan program Kerjasama dalam bidang Pendidikan. LPP NTB sebagai Lembaga independen yang bekerja untuk segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan beasiswa masyarakat NTB antaranya, melakukan seleksi, pengembangan minat, hingga pengembangan bakat calon peserta beasiswa.

3.2. Kunjungan Resmi Antar Pemerintah Daerah NTB dengan Kujawsko

Pemerintah wilayah Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan resmi ke Polandia berlangsung sebanyak 2 (dua) kali kunjungan. Kunjungan resmi yang pernah dilakukan oleh pemerintah wilayah NTB ke Polandia terekam dalam beberapa klasifikasi dokumen, seperti dokumen resmi yang diarsipkan oleh Biro ADPIM dan juga dokumen yang terekam melalui media sosial pribadi Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah. Kunjungan resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah wilayah atau perwakilan pemerintah wilayah berupa Kunjungan Kerja dan sambutan mahasiswa baru yang diterima oleh perguruan tinggi di Polandia.

Gambar 3. 1 Kunjungan Kerja Pemerintah Wilayah NTB ke Kedubes Polandia



Sumber: Dokumentasi Biro ADPIM 2019

Gambar 3. 2 Sambutan Mahasiswa Baru oleh Nicolaus Copernicus University



Sumber: Facebook Kujawsko-Pomorskie International, 07 Oktober 2021

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kerja sekaligus ikatan politik Kerjasama antara negara dan juga antar sus-negara di Indonesia khususnya pemerintah wilayah NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia. Para mahasiswa atau awardee beasiswa dari program beasiswa LPP NTB juga sebagai salah satu jenis kegiatan berkelanjutan yang saat ini masih berlangsung. Kontribusi para mahasiswa asal NTB diharapkan dapat memberikan aksi nyata terkait pembangunan kualitas sumber daya manusia masyarakat NTB.

Hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah dalam wawancara, menyampaikan: “kunjungan resmi LPP ke Polandia ada, kemarin monitoring dan evaluasi mahasiswa, kemudian evaluasi kampus-kampus yang dapat diajak bekerjasama” (Firmansyah, 2021); “mereka juga (pihak pemerintah Polandia) dulu sering berkunjung sebelum covid di tahun sekitar 2018 atau 2019” (Firmansyah, 2021); “Banyak undangan kegiatan ke Polandia terkait pendidikan namun terkendala covid” (Firmansyah, 2021); “Rencana kegiatan yang sedang diusulkan tidak ada karena covid, namun yang masih berjalan ya ini pengiriman mahasiswa” (Firmansyah, 2021); “Yang sudah selesai pendidikan ada di data sekitar 20-30 dan tahun ini akan bertambah, yang dikirim juga sudah banyak, semua ada di data” (Firmansyah, 2021); “Kontribusi alumni dan mahasiswa, sekarang kami punya kegiatan alumni, kegiatan bantu masyarakat dalam bentuk proyek pembangunan UMKM, Pokdarwis, ada juga dengan guru dan macam-macam. Itu salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan di awal, nanti akan berlanjut...mereka kan sebelum berangkat ke NTB kita bekal pengetahuan terkait informasi NTB yang dapat diceritakan di sana, mengenalkan daerah kepada audiens yang lebih luas disana (Polandia)” (Firmansyah, 2021).

Menurut data yang berhasil peneliti rangkum setidaknya terdapat dua kali kunjungan NTB ke Kujawsko-Pomorskie Polandia. Pertama, pertemuan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dengan koleganya di Polandia. Hal ini disampaikan oleh Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah dalam wawancara, menyampaikan: “Proses kerjasama, Pak Gub ini kan teman dekatnya pak dubes, dubes sebelum yang ini... dia itu temannya pak gubernur dulu ketemu dan bercerita

punya mahasiswa dan ingin mengirimkan mahasiswa, nah dari sini awalnya Polandia menerima mahasiswa melalui LPP NTB” (Firmansyah, 2021).

Kedekatan secara personal dan politik gubernur Wilayah NTB dengan mantan duta besar Polandia periode saat ini yang membuat Polandia menjadi negara tujuan pertama dan sekaligus menjadi suksesor program beasiswa NTB. Meskipun begitu, paradiplomasi Pemerintah Wilayah NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia dapat terlaksana karena pemerintah pusat memiliki Kerjasama pula dengan Polandia, sebagaimana disampaikan oleh Kasubbag Administrasi Biro ADPIM Pemerintah Wilayah NTB “Kerjasama NTB-Polandia bisa terlaksana karena pusat sudah memiliki kerjasama...Misal Indonesia dan Israel tidak ada kerjasama maka kita (NTB) tidak dapat mengusul kerjasama. Jadi begitu, kita bergantung sama pusat, kita tetap berkoordinasi dengan pusat” (Zubaer, 2021)

Artinya bahwa hubungan paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Wilayah NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Fungsi paradiplomasi antar sub-state dengan sub-state lainnya salah satunya adalah untuk mengoptimalkan hubungan diplomatik antar negara dengan negara lainnya.

Kedua, Kunjungan resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah wilayah atau perwakilan pemerintah wilayah berupa Kunjungan Kerja dan sambutan mahasiswa baru yang diterima oleh perguruan tinggi di Polandia. Kunjungan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah NTB beserta para mahasiswa baru yang lolos beasiswa ke berbagai perguruan tinggi di Polandia.

Saat ini Pemerintah Daerah NTB sedang menjajaki kerjasama dengan beberapa daerah di luar negeri, salah satunya dengan Kujawsko-Pomorskie -

Republik Polandia. Keikutsertaan Provinsi Kembar ini didorong oleh kerinduan Daerah NTB untuk meningkatkan dan mengefektifkan kemampuan daerah-daerah di NTB.

Paradiplomasi sebagai diplomasi regional yang berada di bawah kedaulatan negara yang mekanismenya adalah menjadikan aktor negara sebagai penghubung untuk terciptanya hubungan tersebut. Definisi mengenai paradiplomasi dipaparkan oleh Kuznetsov (dalam Maksun dan Azmawati, 2020: 19) dengan melihat definisi-definisi hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah dapat dimaknai sebagai paradiplomasi.

Paradiplomasi atau Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota merupakan bentuk partisipasi pemerintah lokal di arena internasional. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Wilayah NTB dengan Polandia merupakan salah satu bentuk partisipasi pemerintah NTB di dalam arena internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas NTB di mata dunia.

Paradiplomasi merupakan instrumen pembangunan (Mukti, 2020: 3). Selayaknya sebuah instrumen pembangunan, upaya pemerintah wilayah NTB dalam hubungan kerjasamanya dengan Kujawsko Pomorskie Polandia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM masyarakat NTB. Instrumen ini dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah wilayah NTB dengan melakukan kegiatan paradiplomasi dalam bidang Pendidikan dengan Kujawsko Pomorskie, Polandia. Bidang Pendidikan yang menjadi keunggulan dalam program paradiplomasi tersebut adalah dengan memberikan beasiswa

Pendidikan S2 ke beberapa perguruan tinggi yang ada di Kujawsko Pomorskie Polandia.

Semangat program ini dapat menjadi batu loncatan bagi masyarakat NTB yang secara demografi dikenal sebagai daerah pinggiran dengan tingkat Pendidikan masyarakatnya yang rendah. Rendahnya capaian Pendidikan yang dapat ditempuh oleh masyarakat NTB dapat diukur dengan tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah NTB didalam sebuah laporan Statistik Pendidikan Wilayah Nusa Tenggara Barat (2019: 29-30) menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 8,9% masyarakat NTB yang mampu menyelesaikan Pendidikan pada perguruan tinggi sedangkan 24,21% menyelesaikan Pendidikan di SMA atau sederajat. Data ini menunjukkan bahwa serapan Pendidikan yang rata-rata mampu diraih oleh masyarakat NTB masih didominasi pada level Pendidikan SMA dan sederajat. Data tersebut juga menunjukkan semakin tinggi jenjang Pendidikan, maka semakin kecil angka partisipasinya.

Partisipasi masyarakat akan Pendidikan yang semakin tinggi menjadi kebutuhan pokok dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selain itu juga Pendidikan menjadi tolak ukur dalam indeks pembangunan manusia di NTB. Paradiplomasi NTB- Kujawsko Pomorskie Polandia dalam bidang Pendidikan dapat menjadi salah satu cara pemerintah wilayah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat NTB dalam Pendidikan tinggi. Hal ini tertuang dalam LoI (*Letter of Intent*) yang ditandatangani pada tahun 2020 dan sebelumnya tertuang didalam sebuah rencana kerjasama antara Pemerintah Wilayah Nusa Tenggara Barat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kujawsko Pomorskie Republik Polandia

tentang Wilayah kembar yang ditandatangani pada tahun 2019 menyatakan keinginan kedua belah pihak dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Perjalanan Kerjasama Pemerintah Wilayah Nusa Tenggara Barat Republik Indonesia dan Pemerintah Kujawsko Pomorskie Republik Polandia menuai banyak hambatan, salah satunya dan yang menjadi hambatan terbesar adalah wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penduduk di berbagai belahan negara.

Sifat Kerjasama yang ingin dibentuk sebetulnya tidak saja terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, namun terdapat juga program promosi pariwisata dan program mendukung fasilitas perdagangan dan investasi. Oleh sebab wabah pandemi Covid-19, program yang dapat dilaksanakan ialah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang tertuang dalam program beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat NTB yang lolos seleksi untuk diberangkatkan sekolah ke beberapa perguruan tinggi yang ada di Polandia.

3.3. Partisipasi NTB dalam Forum Internasional

Terdapat satu jenis partisipasi dalam forum internasional yang dilakukan oleh pemerintah NTB dengan kaitannya Kerjasama internasional dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia yaitu melalui program Erasmus (LPP NTB, 2021). Para mahasiswa asal NTB atau para awardee yang tengah menempuh Pendidikan di Polandia sejumlah 20 mahasiswa NTB lulus Program Erasmus. Program Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) adalah program pertukaran mahasiswa di Uni Eropa yang didirikan pada tahun 1987. Program Erasmus adalah bagian penting dari Program Pembelajaran Seumur Hidup

UE 2007-2013 hanya sebagai fitur struktur fungsional Komisi Eropa. untuk pendidikan lanjutan.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa ada tujuh negara pengaturan siswa dari NTB, khususnya satu siswa di Hungaria untuk kepentingan Muhammad Rivani Gunawan, lima orang di Turki, yaitu Arida Meilani, Dione Darmansyah Putra Alief, Nazilatus Syiam, Maulana Alif Akbar, dan Zefanya. Andrian Girsang. Kemudian, saat itu, di Prancis ada delapan mahasiswa pengganti, yakni Dewi Permatasari, Dita Dismalasari Dewi, Iqro Asmi Muttaqien, Kiki Risqi Amalia, Luluk Valentina, Restu Alpiansah, dan Sumandi. Di Portugal, ada tiga pemain pengganti, yaitu Dwiki Laitalihin, Riadatus Solihin dan Tiwi Permatasari Muhammad Saleh. Terakhir dua mahasiswa di Jerman, yaitu Baiq Syahriska Rahayu dan Dita Dismalasari Dewi.

Dengan prestasi dan keterlibatan mahasiswa asal NTB dalam hal ini membuktikan bahwa mahasiswa asal NTB dapat bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa internasional yang ada di Polandia. Artinya bahwa Ketika mahasiswa asal NTB diberikan kesempatan untuk berkompetisi mereka memiliki peluang dan kemampuan yang cukup yang tidak jauh berbeda dengan kemampuan para mahasiswa di negara lain.

Latar belakang kesuksesan yang berhasil diraih oleh para mahasiswa atau awardee beasiswa khususnya yang kuliah di Polandia merupakan bagian dari hasil kerja keras LPP NTB. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB ditunjuk sebagai satu-satunya mitra oleh pemerintah wilayah untuk menangani program beasiswa dengan perguruan tinggi luar negeri, salah satunya adalah perguruan tinggi yang ada di Polandia. Dalam program Beasiswa NTB yang dilakukan oleh LPP NTB mempermudah segala keperluan baik administratif hingga keperluan

kompetensi calon penerima beasiswa. Wawancara dengan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah mengatakan: “LPP membantu memberikan skema seperti sosialisasi, pendaftaran, seleksi, kemudian wawancara, pelatihan seperti apa, sampai sekolah seperti apa pembinaannya, kemudian hingga pulang ke Indonesia, kemudian mengurus alumni bagaimana caranya. Itu LPP yang membikin skema kemudian memberitahu pemprov bagaimana skemanya.” (Firman, 2021)

Peran LPP NTB dalam Kerjasama Pemerintah Wilayah NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia mulai dari hulu hingga hilir. Seperti yang disampaikan dalam wawancara di atas, LPP NTB yang melakukan sosialisasi, pendaftaran, seleksi, kemudian melakukan pelatihan, pembinaan, hingga para penerima beasiswa Kembali ke Indonesia untuk mengurus alumni masih dikendalikan oleh LPP NTB. Sehingga peran dan fungsi LPP NTB dalam Kerjasama atau paradiplomasi ini begitu sangat penting.

LPP NTB sebagai yayasan bebas yang disibukkan dengan pengajaran, persiapan, ujian, dan administrasi daerah telah membuat komitmen besar dalam menggarap sifat SDM NTB, khususnya dalam Kerjasama Pendidikan dengan perguruan tinggi di Polandia. Realitanya sebagai kaki tangan Pemda NTB menyusun program pemerintah di bidang pendidikan dan persiapan hibah ke luar negeri.

Tuan rumah program hibah NTB menjadi pemicu untuk pertemuan yang berbeda karena program ini memiliki berbagai jenis bantuan, seperti bantuan uang, dukungan hubungan partisipasi, dan dukungan untuk memberikan hibah kepada kelompok masyarakat NTB (sebagian besar anak muda). Meskipun informasi yang adil dan merata tentang prestasi daerah dalam hal prestasi instruktif masih tinggi,

hasil normal dari pelatihan di tingkat sekolah menengah atau yang sebanding tinggi, namun minat individu yang perlu terlibat dengan hibah LPP NTB program sangat tinggi, terutama keinginan yang luar biasa untuk melanjutkan ujian mereka di luar negeri. Pemerintah Daerah NTB telah memilih untuk memanfaatkan aset APBD untuk program ini pada tahun 2020. LPP NTB membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB selama waktu yang dihabiskan untuk membiayai Beasiswa NTB.

Kuantitas angkut penerima hibah NTB dari 2018 hingga 2021 dengan kelas A, B, dan C per 1 September 2021 adalah 595 orang. Penyaluran penerima hibah untuk perguruan tinggi di Polandia adalah 137 penerima beasiswa, tertinggi kedua setelah Malaysia dengan jumlah 254 Penerima. Perguruan tinggi di berbagai negara seperti Rusia (4 penerima), Cina (28 penerima), Taiwan (9 penerima), Ceko (7 penerima), Hungaria (1 penerima), dan Sudan (14 penerima). Informasi ini menunjukkan bahwa hubungan paradiplomasi otoritas publik wilayah NTB-Kujawsko Pomorskie Polandia menunjukkan pola yang layak kontras dengan negara-negara yang berbeda, khususnya di bidang Kerjasama untuk bekerja pada sifat SDM dengan program hibah (LPP NTB, 2021)

Polandia adalah negara pertama yang menjadi kerjasama dengan LPP NTB untuk program Beasiswa NTB. Ada dua perguruan tinggi yang menjadi pionir, yaitu Collegium Civitas dan Vistula University. Alasan mengapa Polandia menjadi negara pertama yang dapat dijadikan sebagai mitra untuk program beasiswa LPP NTB yaitu karena kedekatan gubernur Wilayah NTB Dr. Zulkieflimansyah.

3.4. Pembentukan Kelompok Kerja Regional dalam Kerja sama dengan Kujawsko

Pemerintah Daerah NTB dengan Biro Administrasi Kerjasama telah membentuk tim kerja (*Action Plan*) sesuai dengan bidang dalam Kerjasama paradiplomasi NTB-Kujawsko Pomorskie Polandia yaitu Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya dan Bidang Pendidikan (Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB, 2019).

Tabel. 3.1 Action Plan Pemerintah NTB

SKPD	PROGRAM KERJA	TARGET
1. Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya		
1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Famtrip Blogger/promosi pariwisata, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Video Pariwisata, 2. Pembuatan Brosur Pariwisata. • Promosi Duta Seni/ Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengenalan wisata dan budaya provinsi NTB kepada blogger, jurnalis, tour dan travel operator. • Terwujudnya film profil dan potensi NTB untuk penguatan destinasi dan event unggulan NTB dan terpasangnya brosur kepariwisataan di kedua provinsi. • Terwujudnya Transfer of Knowledge informasi pariwisata dan budaya serta pengiriman duta seni budaya kedua Provinsi
2. Pendidikan		
Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman Siswa dan Mahasiswa. • Pengiriman Guru dan Tenaga Pendidik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa untuk pemuda/pemudi NTB untuk melanjutkan pendidikan di Kujawsko-Pomorskie Polandia. • Pertukaran pelajar antara pelajar NTB dengan pelajar Kujawsko-Pomorskie Polandia.

3. Bidang Pelayanan Terpadu, Ekonomi dan Perdagangan.		
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.	• Promosi Investasi.	• Memperluas dan membuka kesempatan kerjasama investasi dan promosi investasi.

Sumber: Biro Kerjasama NTB

Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya merupakan bagian dari upaya Pemda NTB untuk dapat memperluas jaringan Kerjasama terutama pada hal promosi pariwisata dan juga perihal kebudayaan masyarakat NTB. Dalam bidang ini, Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut aktif memantau dan juga merancang kegiatan yang dapat dilakukan pada Kerjasama Pemda NTB-Kujawsko Pomorskie Polandia. Adapun jenis program kerja yang telah dibentuk yaitu, Famtrip Blogger/Promosi Pariwisata melalui pembuatan video dokumentasi terkait pariwisata dan pembuatan brosur pariwisata. Program selanjutnya adalah Promosi Duta Seni/Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, dalam hal ini rencana Pemda NTB adalah dapat mengutus sekaligus memperkenalkan para duta seni atau tokoh budaya yang dapat mempromosikan kekayaan budaya masyarakat NTB. Target yang ingin dicapai oleh Pemda NTB dalam dua program tersebut adalah:

- a) Terwujudnya pengenalan wisata dan budaya Provinsi NTB kepada blogger, jurnalis, tour & travel operator.
- b) Terwujudnya film profil dan potensi NTB untuk penguatan destinasi dan event unggulan NTB serta terpasangnya brosur kepariwisataan di kedua provinsi.
- c) Terwujudnya *transfer of knowledge* informasi pariwisata dan budaya serta pengiriman duta seni budaya kedua provinsi.

Bidang kedua adalah Bidang Pendidikan yang dalam hal ini sebagai upaya Pemda NTB dan Pemda Kujawsko dapat saling memberikan kontribusi yang terukur dalam meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat, terutama bagi masyarakat NTB yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya. Dalam Bidang Pendidikan ini Pemda NTB mempercayai LPP NTB untuk menangani Kerjasama perihal pengembangan Pendidikan masyarakat NTB khususnya dalam kerjasama Pendidikan oleh kedua provinsi. Program kerja yang dirancang dalam bidang ini adalah pengiriman siswa dan mahasiswa, dan program pengiriman guru dan tenaga pendidik. Adapun target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Beasiswa untuk pemuda-pemudi NTB untuk melanjutkan Pendidikan di Kujawsko-Pomorskie.
- b) Pertukaran pelajar antara pelajar NTB dengan pelajar Kujawsko-Pomorskie.

Kajian singkat terkait rencana kerjasama pemerintah provinsi NTB dengan pemerintah provinsi Kujawsko Pomorskie Polandia saling mendukung untuk dilakukannya Kerjasama Provinsi Kembar dengan beberapa pertimbangan kajian sebagai berikut :

Kebijakan desentralisasi telah mendorong terjalannya kerjasama antar daerah baik secara nasional maupun internasional. Kerja sama yang dilakukan oleh daerah disebabkan oleh adanya keterbatasan yang dimiliki setiap daerah. Lebih lanjut bahwa Globalisasi dan Desentralisasi mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah di Indonesia dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memicu daerah untuk memiliki inisiatif melaksanakan kerjasama yang lebih luas, sehingga mendorong berkembangnya Kerjasama Twin Province.

Kerjasama Twin Province merupakan perjanjian kerja sama antar provinsi antara dua negara dalam upaya untuk memajukan perekonomian dan promosi kebudayaan. Provinsi Kembar adalah konsep penggabungan dua provinsi yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Provinsi kembar pada umumnya memiliki persamaan karakteristik, kondisi demografi, dan masalah- masalah yang dihadapi. Adanya hubungan kerjasama Provinsi kembar bermanfaat bagi program pembangunan misalnya pertukaran SDM, ASN, pertukaran pelajar dan kerjasama di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata.

Kerjasama Twin Province antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kujawsko Pomorskie merupakan inisiatif bersama dari kedua belah pihak berdasarkan pada kesamaan karakteristik dan kepentingan antara masing-masing Provinsi.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Twin Province, manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan kerjasama Twin Province yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kujawsko Pomorskie meliputi : pertukaran pengetahuan dan pengalaman tentang pembangunan dibidang masing-masing, mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah, masyarakat dan swasta, meningkatkan optimalisasi pengelolaan potensi daerah: optimalisasi sumberdaya pariwisata, mempererat persahabatan antara pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak: pertukaran kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

Adanya kegiatan kerjasama Twin Province yang dilakukan antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kujawsko Pomorskie dapat

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, mendorong upaya mewujudkan kemandirian daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meningkatkan kemampuan daerah dalam persaingan global, mewujudkan kerjasama antar kota dan daerah yang saling menguntungkan dan mewujudkan suatu international networking dan international friendship.

Kerjasama Twin Province ini diharapkan memberikan keuntungan yang signifikan bagi penataan daerah Provinsi tidak hanya di sektor pendidikan, budaya dan pariwisata saja namun akan memberikan kontribusi bagi sektor lainnya dan sektor terkait dalam mendukung kemajuan perekonomian dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat menganggap perlu kerjasama Twin Province dengan Pemerintah Kujawsko Pomorskie dapat terealisasi. Karena upaya menggarap dasar-dasar keuangan untuk menumbuhkan ekonomi lokal adalah dengan membina jaringan administrasi yang penting bagi pengembangan limit bekerja untuk mengakui administrasi besar yang mendorong keuntungan bersama. Cara distrik harus memiliki batasan yang berbeda untuk menyelesaikan putaran acara yang berbeda, dan pengorganisasian metropolitan/umum adalah pembenaran yang cukup besar di balik kesempatan siklus belajar mandiri dan kerjasama dengan pertemuan yang berbeda, yang memungkinkan lokal memiliki kesempatan untuk saling menguntungkan satu sama lain. dan berbagi pertemuan (aktivitas dan belajar sambil melakukan). salah satunya dengan membina model Provinsi Kembar dengan wilayah di negara yang berbeda, sehingga akan terjadi pertukaran perjumpaan dari tempat yang berbeda, melalui suatu organisasi yang tersusun. Kerjasama Provinsi

Kembar sangat bermanfaat dalam proses cepat belajar di daerah, membuat keterkaitan kepentingan yang lebih luas (basis ekspansif).

Sejauh ini dokumen resmi pembentukan kerjasama kedua belah pihak berbentuk *Letter of Intens* (LoI). Dalam dokumen tersebut termuat bidang Kerjasama dalam bentuk yaitu (1) promosi pariwisata; (2) untuk mendukung fasilitas perdagangan dan investasi, dan; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan rencana pembentukan *Memorandum of Understanding* (MoU) sejauh ini masih dalam rencana, kendala utama yang menyebabkan MoU belum jadi adalah wabah pandemic Covid-19 sehingga kedua belah pihak hingga saat ini sulit untuk membuat pertemuan atau perjanjian.

Pembentukan kelompok kerja untuk menindaklanjuti perjanjian yang tertuang dalam LoI diserahkan kepada LPP NTB sebagai Lembaga satu-satunya yang menangani bidang Pendidikan, secara khusus yakni bidang beasiswa bagi pelajar asal NTB. Kedua bidang lainnya yaitu promosi pariwisata dan dukungan fasilitas perdagangan dan investasi belum bisa maksimal untuk dikerjakan. Hal ini disebabkan juga oleh kendala yang dialami secara global yaitu pandemic Covid-19. Namun beberapa hal terkait promosi pariwisata dilakukan oleh pemerintah NTB dengan bekerjasama dengan para mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di beberapa perguruan tinggi di Polandia. Mereka dihibau untuk dapat melakukan promosi pariwisata di NTB secara sukarela, artinya tanpa dengan bentuk kegiatan atau program khusus yang dapat dilakukan di Polandia.

Adapun dokumen MoU meski belum resmi tidak bisa diberikan oleh pihak pemerintah, karena sifatnya yang belum resmi sehingga dokumen ini masih tertutup. Namun dari beberapa informan dari pemerintah setempat dengan yakin

mengatakan bahwa dokumen tersebut telah dipersiapkan dan akan dipublikasi
Ketika sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Provinsi
NTB dan Pemerintah Provinsi Kujawsko Pomorskie Polandia.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hubungan paradiplomasi pemerintah Wilayah NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia menuai kesepakatan sejak tahun 2019 yang tertuang dalam bentuk dokumen *Letter of Intens* (LoI) dan pembentukan dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) terhambat karena situasi pandemic global Covid-19 yang seharusnya penandatanganan MoU dapat terbentuk di awal tahun 2020. Dalam LoI tersebut termuat kehendak para pihak untuk membentuk Kerjasama dalam bidang promosi pariwisata, mendukung fasilitas perdagangan dan investasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Meskipun dengan hambatan pembentukan dokumen tersebut bentuk kegiatan kerjasama tetap berjalan dengan catatan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam dokumen LoI tidak dapat berjalan dengan semestinya. Namun satu kegiatan yang dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan membentuk program beasiswa bagi masyarakat NTB yang ingin melanjutkan studi S2 ke perguruan tinggi yang ada di Polandia.

Kerjasama dalam bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini pemerintah wilayah NTB menunjuk Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB sebagai Lembaga yang menjembatani keperluan kerjasama. Mulai dari kegiatan penguatan kapasitas Pendidikan hingga pelatihan yang terkait dengan studi ke luar negeri, khususnya di negara Polandia.

Kesimpulan penting lainnya dalam kaitannya hubungan paradiplomasi pemerintah Wilayah NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia jika merujuk pada prinsip yang dituangkan oleh Kuznetsov (2015) yaitu, Pertama, membentuk departemen yang secara khusus bertanggung jawab atas urusan kerjasama internasional. kedua, Membuka kantor subnasional yang secara permanen berada di luar negeri. Ketiga, adanya kunjungan resmi yang dilakukan otoritas wilayah ke negara asing. Keempat, ambil bagian dalam berbagai acara global seperti pameran, pertemuan, dll yang dikoordinasikan oleh penghibur yang tidak dikenal. Kelima, pembentukan dan adanya partisipasi dalam jaringan dan kelompok kerja regional secara multilateral global dan lintas batas mengenai masalah-masalah yang spesifik seperti pertanian, pembangunan berkelanjutan, energi, transportasi, dll. Keenam, adanya partisipasi oleh otoritas wilayah dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh entitas asing dalam kegiatan delegasi resmi pemerintah pusat mereka. Dalam hal ini, hubungan paradiplomasi pemerintah Wilayah NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia hanya mampu memenuhi *empat* dari *enam* prinsip utama tentang paradiplomasi oleh Kuznetsov (2015). Dua prinsip yang tidak dapat terpenuhi adalah, tidak adanya kantor subnasional yang secara permanen berada di Polandia dan tidak adanya partisipasi oleh otoritas wilayah dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh entitas asing dalam kegiatan delegasi resmi pemerintah pusat mereka.

Untuk menelusuri alasan mengapa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam prinsip paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Wilayah NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia seperti yang dituangkan oleh Kuznetsov (2015) adalah merujuk dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2006,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, yang diperbaharui dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 membaca pasal 27 ayat (1) bahwa pelaksanaan kerjasama harus memenuhi kebutuhan butir (c) khususnya Pemerintah Daerah tidak membuka tempat kerja delegasi di luar negeri. Sesuai Ali Mukti (2020: 26) pedoman bahwa negara-negara terdekat tidak diizinkan untuk membuka tempat kerja delegasi di luar negeri muncul karena peluncuran Perwakilan Pemerintah Daerah Jawa Timur di Australia Barat selama tahun 1990-an. Diharapkan kickoff kantor agen dapat menjadi cara bagi berbagai lokal yang memiliki kemungkinan kelemahan tertentu untuk melakukan hal serupa di luar negeri.

Untuk alasan nomor 2 tentang tidak terpenuhinya unsur yaitu adanya partisipasi oleh otoritas wilayah dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh entitas asing dalam kegiatan delegasi resmi pemerintah pusat mereka. Hal ini disebabkan oleh situasi global yang melanda seluruh negeri yaitu wabah pandemic Covid-19. Wabah ini berpotensi memutus banyak hal, termasuk komunikasi dan yang paling penting adalah interaksi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (Pemerintah Wilayah NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia) menjadi tidak terlaksana. Janji-janji kegiatan dan program menjadi terkendala. Namun upaya Kerjasama yang saat ini sudah tertuang dalam *Letter of Intens* (LoI) secara optimal dapat berlangsung di dalam program pemberian beasiswa yang diwakilkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, program-program lainnya yang sudah tertuang dalam perjanjian akan dilaksanakan jika situasi global bisa kondusif lagi.

4.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memetakan beberapa rekomendasi, diantaranya:

Pertama, untuk Pemerintah Wilayah NTB sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup tinggi untuk memperhatikan proyeksi-proyeksi kerjasama dalam bentuk paradiplomasi dengan pihak asing yang berkaitan tentang pendidikan masyarakat NTB supaya memperhatikan luaran dari hasil Kerjasama dalam bidang Pendidikan seperti promosi kebudayaan, pariwisata, dan segala jenis sumber sosio-ekonomi masyarakat kepada pihak asing. Mengingat wilayah Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai daerah yang memiliki ruang wisata yang cukup beragam seperti desa wisata, wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata kuliner. Hal ini tentu akan lebih menarik untuk dikaji perkembangannya, meski di sisi lain peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat NTB juga penting.

Kedua, untuk para pengguna dan pembaca hasil penelitian ini dan khususnya untuk peneliti selanjutnya supaya hasil penelitian ini menjadi tambahan pengetahuan khususnya mengenai paradiplomasi pemerintah wilayah NTB dan menjadikan hasil penelitian ini sebagai penambah wacana pengetahuan terkait paradiplomasi pemerintah wilayah NTB dengan Kujawsko Pomorskie Polandia. Mengingat temuan dari hasil penelitian ini yang sangat terbatas, penelitian dengan segala kerendahan hati mengharapkan banyak masukan dan evaluasi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman, Raden, 2020. *Analisis Paradiplomasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Victoria Melalui Konsep At-Ta'awun dalam Peningkatan Sektor Pendidikan Tahun 2017-2019*. *Mediasi: Journal of International Relation*, 3 (2), 31-50.
- Alam, G.N., & Sudirman, A., 2020. *Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui kerjasama Sister City*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16 (1), 31-50.
- Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB, (2019). *Kajian: Kerja Sama Provinsi Kembar/Twin Province NTB-Republik Indonesia dengan Kujawsko-Pomorskie Republik Polandia*.
- Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB, 2019. *Romantiasme Hubungan Pemerintah Provinsi NTB dengan Polandia* <https://birokerjasama.ntbprov.go.id/detail/pages/25> (diakses pada 2 November 2021)
- Biro Administrasi Kerja Sama Setda NTB, 2019. *Fasilitasi dan Persetujuan Rencana Provinsi Kembar, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Republik Indonesia dan Pemerintah Kujawsko Pomorskie Polandia*.
- Devitayanti, E., 2018. *Peran Pemerintah Wilayah NTB dalam Kerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ (German)*. Skripsi. Malang: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Kuznetsov, Alexander S. 2015. Theory and Practice of Paradiplomacy Subnational Governments in international affairs. New York: Routledge.

LPP NTB. 2021. 20 Mahasiswa NTB di Polandia Lulus Program Erasmus.

<https://www.lppntb.com/berita-dan-kegiatan/samawarea-com-20-mahasiswa-ntb-di-polandia-lulus-program-erasmus> (diakses pada 31 Oktober 2021).

LPP NTB. 2021. Sebaran Penerima Beasiswa NTB 2018-2021. <https://www.lppntb.com/perpustakaan/statistik> (diakses pada 31 Oktober 2021).

Maksum, S.A. & Azmawati, D. 2020. Pelembagaan Kebijakan Paradiplomasi Indonesia Dimensi Arsitektural dan Konstitusional. Yogyakarta: UMY Press.


Mukti, T.A., 2015. Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di For a Internasional. the Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas hasanuddin, 1 (1), 85-94

Parastasia. C., 2021. Sister City NTB dan Kujawsko-Pomorskie Seharusnya Melibatkan Masyarakat. [https://kumparan.com/cindyparastasia/sister-city-ntb-dan kujawsko-pomorskie-seharusnya-melibatkan-masyarakat-1v2i4rztyaM](https://kumparan.com/cindyparastasia/sister-city-ntb-dan-kujawsko-pomorskie-seharusnya-melibatkan-masyarakat-1v2i4rztyaM)

- Pratama, D.P., 2020. Paradiplomacy Practice in Indonesia: a Lesson from West Nusa Tenggara Province in 2013-2018. *Islamic World and Politics*, 4 (1), 62-85.
- _____, 2020. Analisis Kebijakan Paradiplomasi Wilayah Nusa Tenggara Barat Era Gubernur Dr. Zulkieflimansyah Tahun 2018” Tesis. Yogyakarta: Master of Political Science and International Relationship.
- Putri, Baiq Dita, R., 2019. Paradiplomasi Pemerintah Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos) dalam Kebijakan Energi Terbarukan Biogas. Skripsi. Malang: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sibawaihi, A., 2016. Proses Pengambilan Keputusan Pemprov NTB membangun Kerjasama Sister Province dengan Pemprov Zhejiang RRT (2014-2015). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Surwandono & Maksum, A., 2020. The Architecture of Diplomacy Regime in Indonesia: a Content Analysis. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22 (1), 77-99.
- Surya, A. & Bukhari, A.S., 2019. Peluang dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia dengan Negara-Negara Visegard. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 9 (1), 67-78.

LAMPIRAN

Lampiran I. Formulir Persetujuan Partisipasi Riset

 Program Studi
Hubungan Internasional

Gedung Soekiman Wirjosandjojo
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliburang km. 14,5 Yogyakarta 55584
Laman web: iuii.ac.id | Email: iui@iui.ac.id
Telepon: 0274 896444

FORMULIR PERSETUJUAN PARTISIPASI RISET


Judul Riset:
**Paradiplomasi Dalam Hubungan Nusa Tenggara Barat dan Kujawsko-Pomorskie Polandia
2019-2021**


Terima kasih telah membaca lembar Ringkasan Informasi Riset. Jika Anda berkenan berpartisipasi, silakan melengkapi dan menandatangani formulir di bawah ini. Beri tanda silang dalam kotak (*check box*) di bawah ini untuk mengonfirmasi bahwa Anda setuju pada setiap pernyataan:

- Saya mengonfirmasi bahwa saya telah membaca dan memahami lembar Ringkasan Informasi Riset dan telah memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
- Saya mengerti bahwa keikutsertaan saya bersifat sukarela dan bahwa saya bebas untuk menarik diri dari riset ini kapan saja sebelum 30 hari sejak wawancara, tanpa memberikan alasan dan tanpa ada konsekuensi negatif. Selain itu, jika saya tidak ingin menjawab pertanyaan atau pertanyaan tertentu, saya bebas untuk menolak.
- Saya setuju bahwa wawancara ini direkam dalam format audio. Saya mengerti bahwa rekaman audio yang dibuat dari wawancara ini hanya akan digunakan untuk menganalisis dan bahwa kutipan wawancara tersebut, yang darinya saya tidak akan diidentifikasi secara pribadi, dapat digunakan dalam presentasi konferensi, laporan atau artikel jurnal yang dikembangkan sebagai hasil dari riset. Saya mengerti bahwa tidak akan ada penggunaan lain dari rekaman tanpa izin tertulis dari saya, dan bahwa tidak ada seorang pun di luar tim peneliti akan diizinkan mengakses rekaman asli. Saya mengerti bahwa tanggapan saya akan dijaga kerahasiaannya.
- Saya setuju untuk ambil bagian dalam wawancara ini.


Jika Anda menghendaki kerahasiaan identitas, beri tanda silang dalam kotak di bawah ini:

- Saya menghendaki nama saya tidak akan ditautkan dengan materi riset (*anonymous participant*), dan tidak akan diidentifikasi dalam laporan yang dihasilkan dari riset. Saya setuju bahwa data anonim saya akan disimpan untuk tujuan riset di masa depan seperti publikasi yang terkait dengan riset ini setelah selesainya riset.

Zaedani Firmansyah  28 Agustus 2021

Rizki Dian Nursita,
S.I.P.,M.H.I.  29 Agustus 2021

Formulir II. Surat Permohonan Ijin Pengambilan Data Skripsi



FAKULTAS PSIKOLOGI & ILMU SOSIAL BUDAYA
Gedung Dr. Soekarno Wirasardjaja
Kampus Tengah Universitas Islam Indonesia
Jl. Kuningan km. 14.5 Yogyakarta 55584
T (0274) 896444 ext. 2106, 2114
F (0274) 896444 ext. 2106
E: ipsib@uii.ac.id
W: ipsib.uii.ac.id

Tanggal : 13 September 2021
Nomor : 2631/Dek/70/DURT/IX/2021
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data Skripsi

Kepada :
Yth. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SEKDA Provinsi NTB
c.q Bagian Kerjasama di Mataram

AssalamualaikumWr. Wb

Dalam rangka mengantarkan mahasiswa untuk menjadi sarjana, maka setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Zaedani Firmansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 17323073
Program Studi : Hubungan Internasional
Pembimbing Skripsi : Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.
Judul Skripsi :
"Paradiplomasi Dalam Hubungan Nusa Tenggara Barat dan Kujawsko-Pomorskie Polandia 2019-2021."

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.

WassalamualaikumWr. Wb

Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Dr. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog

Lampiran III. Lembar Disposisi Surat Pengambilan Data

**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI NTB**

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Universitas Islam Indonesia Diterima Tgl. : 16/9 2021

Tanggal Surat : 13/9 2021 No. Agenda : 334

Nomor Surat : 2631 / DEK / 70 / DURT / IX / 2021

Perihal : Permohonan ijin Pengambilan data skripsi

Disposisi Kepada Yth.

Bagian Pemerintahan ✓
Bagian Kerjasama
Bagian Otonomi Daerah

Mataram,


Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Yth. Rini.
mohon dibantu, koordinasi dgn bu ismi pd Bag - Kerjasama

NIP. _____

*Di terima
16/9-21.*

Lampiran IV. Surat Permohonan Fasilitasi Penandatanganan LoI

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pejangik No. 12 Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kode Pos : 83121
Telepon (0370) 622373, Fax (0370) 632016

Mataram, 06 Januari 2020

Nomor : 500/ 40 /KJS/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Mohon Fasilitasi Penandatanganan *LoI*

Kepada
Yth. Duta Besar Republik Indonesia
di -
Warsawa, Polandia

*Bismillaahirrahmaanirrahim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuuh,*

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Nomor:193/162/SJ, tanggal 8 Januari 2020 perihal Tanggapan Rencana Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kujawsko Pomorskie Polandia, dengan ini diharapkan bantuan Ibu untuk kiranya dapat memfasilitasi penyesuaian penandatanganan *Letter of Intent* sebagaimana terlampir.


Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini juga dilampirkan:

1. *Letter of Intent* antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kujawsko Pomorskie Polandia tanggal 16 April 2019.
2. Surat Tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:193/162/SJ, tanggal 8 Januari 2020 perihal Tanggapan Rencana Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kujawsko Pomorskie Polandia

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuuh.

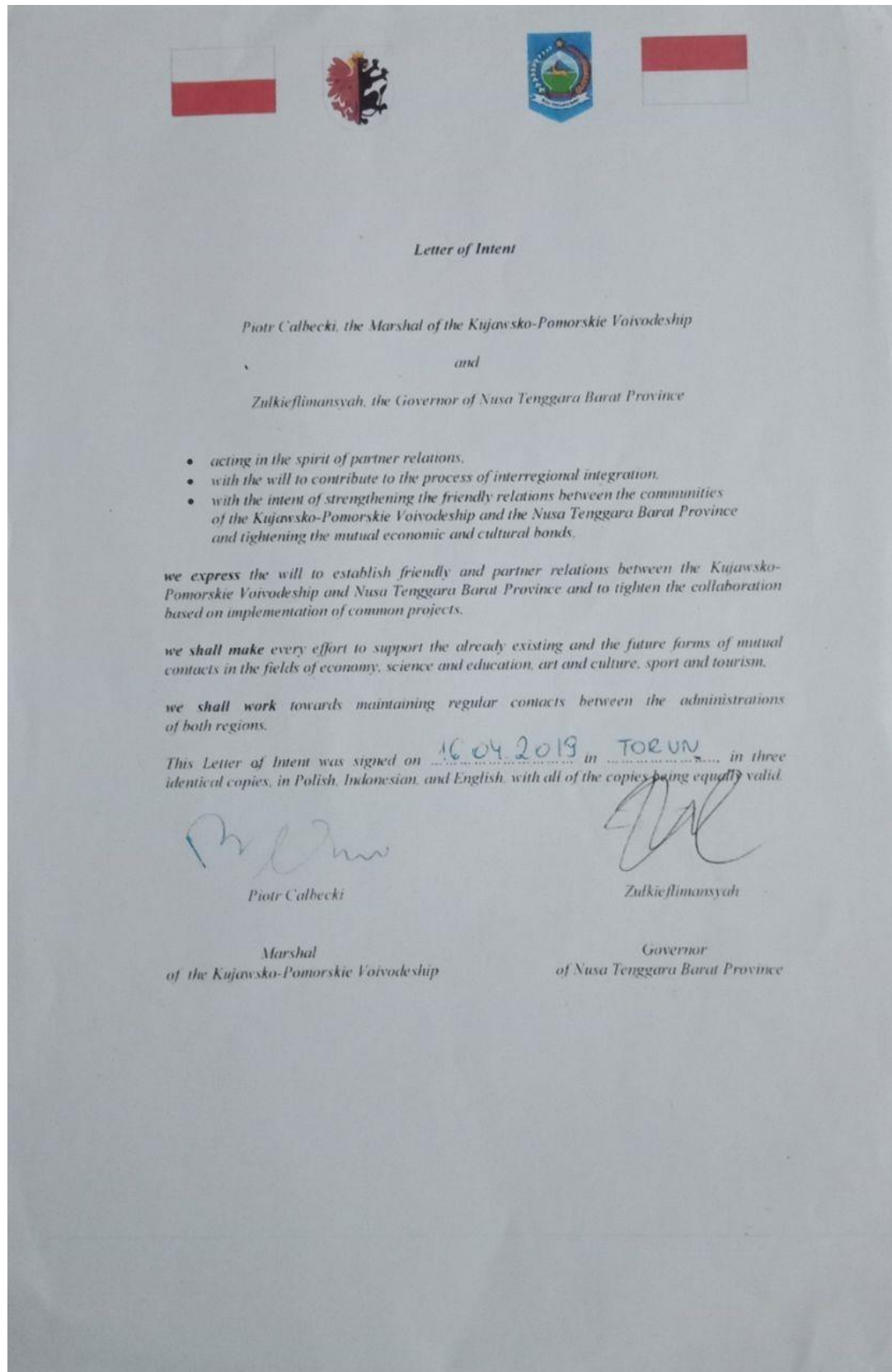
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196510011990031022

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Luar Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Arsip

Lampiran V. LoI NTB-Kujawsko-Pomorskie



Lampiran VI. Wawancara dengan Anggota Tim Gubernur NTB untuk Percepatan Pembangunan Daerah



Lampiran VII. Wawancara dengan Staff ADPIM



Lampiran VIII. Daftar pertanyaan untuk pemangku kebijakan

1. Apa alasan NTB melakukan Kerjasama dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia?
2. Bagaimana perkembangan Kerjasama diplomasi NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia?
3. Apakah sudah membuat MOU, jika (Tidak) apa bukti Kerjasama yang sedang berlangsung?
4. Apa saja jenis Kerjasama paradiplomasi NTB dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia?
5. Siapa saja stakeholders atau Lembaga yang terikat dengan Kerjasama?
6. Apakah ada Departement secara khusus yang bertanggung jawab atas urusan Kerjasama internasional, Departement apa?
7. Apakah ada kantor Sub Nasional yang secara permanent berada di Kujawsko-Pomorskie Polandia?
8. Apakah ada kunjungan resmi yang dilakukan oleh otoritas wilayah ke Kujawsko-Pomorskie Polandia?
9. Apa jenis partisipasi pemerintah dalam kegiatan acara internasional yang diselenggarakan oleh Kujawsko-Pomorskie Polandia?